

**ANALISIS FAKTOR KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DI ERA
NARENDRA MODI TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM INDIA TAHUN
2014-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

FEBRIANSYAH

19323048

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS FAKTOR KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DI ERA
NARENDRA MODI TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM INDIA TAHUN
2014-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

FEBRIANSYAH

19323048

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DI ERA
NARENDRA MODI TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM INDIA TAHUN
2014-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

**Pada Tanggal
16 Juni 2023**

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

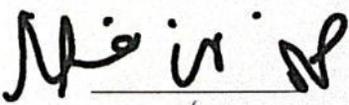


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan


Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 19 Juni 2023



Febriansyah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Bapak Hafidzam dan Ibu Rachmi Fariani

Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, harapan, doa, motivasi, dukungan serta nasihat yang senantiasa kalian berikan.

Kakak Fidhyani dan Adik Hasna Hanifah

Terima kasih atas doa, dukungan serta nasihat yang selalu kalian berikan.

Rekan - rekan Hubungan Internasional UII Angkatan 2019

Terima kasih atas segala dukungan, perjuangan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan di Hubungan Internasional UII

HALAMAN MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5). Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6).” - Q.S. Al-Insyirah [94]: 5-6

“The time you want to give up, stop for a while. Look behind you. Every milestone, every achievement, every support, every challenge that you've already faced perfectly. Are you sure you want to give up now?”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa ta ta'allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang merupakan sebuah persyaratan untuk menyelesaikan studi penulis. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak baik secara materil maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada Penulis berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr.Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Willi Ashadi S.H.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, arahan, waktu serta dukungan yang bapak berikan selama proses saya berkuliah dan menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ketulusan dan kebaikan

bapak dalam mengajar dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat yang berlipat ganda, Aamiin.

6. Seluruh dosen dan civitas akademika Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima Kasih atas segala ilmu-ilmu yang telah diberikan selama saya berkuliah di HI UII. Ketulusan, kesabaran, kebaikan, serta motivasi yang Bapak/Ibu berikan selama saya berkuliah menjadi semangat saya dalam menimba ilmu di HI UII. Terima kasih kepada staff HI UII yang telah membantu penulis dalam urusan akademik. Semoga program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia akan semakin sukses dan dapat meraih visi misi-nya yakni menjadi program studi yang terkemuka dan menghasilkan cendekiawan yang berwawasan global, bermanfaat bagi masyarakat dan berkarakter islami.
7. Kepada orang tua penulis, Hafidzam dan Rachmi Fariani, terima kasih atas segala kasih sayang, kesabaran, dukungan, dan menjadi sosok yang penulis kagumi. Terima kasih menjadi orang tua yang senantiasa memberikan pelajaran hidup sehingga penulis dapat berdiri sekuat hari ini.
8. Kepada kakak dan adik, Fidhyani dan Hasna Hanifah, terima kasih telah menjadi tempat penulis berkeluh kesah, selalu memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis.
9. Kepada sahabat penulis yang tergabung dalam grup “God Bless Sarkem”, Khansa Nafizah Firdaus, Novera Amalya Cinta, Abyan Bari Brahmanta, Abdurrazzaq Dzaky Winarko, Denise Yunitasari, Nadya Zahra Syah Azella, dan Arya Raditya Wiguna. Terima kasih telah menjadi teman belajar, diskusi,

bermain, dan menjadi pengingat dan penguat satu dengan yang lainnya selama masa perkuliahan berlangsung. Terima kasih telah menjadi bagian hidup penulis baik dikala senang maupun sedih selama masa perkuliahan. Semoga kalian semua dapat meraih apapun yang kalian inginkan dengan baik.

10. Kepada sahabat penulis, Annisaa Diva Nugroho, Adnin Nur Fauziah, Ameera Luna Fiorenza, Damita Aqillah Dascha. Terima kasih kalian sudah menjadi teman yang baik, menemani penulis dalam perjalanan kuliah.
11. Kepada para tutor KUD, Derina Faslig Silitonga, Akmal Maulana AR, Muslihah Faradilla. Terima kasih atas segala kebersamaan, nasihat, dan saran kalian semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada teman-teman di HI UII angkatan 2019 yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, terima kasih atas segala kebersamaan, perjuangan, serta dukungan dari teman-teman semua.
13. Kepada para kakak tingkat dan adik tingkat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebersamaan, perjuangan, serta dukungan dari teman-teman semua.
14. Kepada diri sendiri, terima kasih selalu kuat dan dapat bertahan hingga saat ini.

Daftar Isi

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
Pernyataan Integritas Akademik.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel, Grafik, Diagram, dan Figur	xii
Daftar Singkatan	xiii
Abstract	xiv
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	15
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	16
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	16
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	16
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II	18
DINAMIKA KEPEMIMPINAN MODI DI INDIA	18
2.1 Kiprah Narendra Modi di Kancah Politik India	18
2.2 Urgensi dan Ideologi Partai Bharatiya Janata Party (BJP) di India	20

2.3 Kehidupan Masyarakat Muslim di India	23
BAB III	34
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP MUSLIM INDIA TAHUN 2014-2022 MELALUI TRIANGLE VIOLENCE GALTUNG.....	34
3.1 Cultural Violence	34
3.2 Structural Violence	40
3.3 Direct Violence	46
BAB IV	49
Penutup	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	52

Daftar Tabel, Grafik, Diagram, dan Figur

Gambar I	: Violence Triangle oleh Galtung	13
Grafik I	: Gambar Data Kekerasan Komunal di India semenjak BJP menang.....	26
Tabel I	: Tipologi Kekerasan.....	14
Tabel II	: Rangkuman Kekerasan dan Kebijakan sejak Modi Berkuasa.....	33

Daftar Singkatan

1. BJP : Bharatiya Janata Party
2. CAA : Citizenship Amendment Act
3. HRW : Human Rights Watch
4. ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights
5. NCRB : National Crime Records Bureau
6. NDA : National Democratic Alliance
7. PM : Perdana Menteri
8. RSS : Rashtriya Swayamsevak Sangh
9. UPSLC : Uttar Pradesh State Law Commission

Abstract

With a population of 1.45 billion people, India has become the most populous country in the world. Nonetheless, India, which previously labeled its country as a secular country, is still facing issues of racism, Islamophobia. As a result, many Muslims in India face discrimination in daily life from both society and the ruling government. With hindutva as the ideology of the ruling party, the Bharatiya Janata Party (BJP), making people suffer even more because the policies issued deprive them of their rights as citizens.. This research will conduct an in-depth identification of why the Indian government in the Narendra Modi era issued an Islamophobic policy against the Indian Muslim community in 2014-2022. This research will explore religious and ideological factors which are the roots of cultural violence and make anti-Muslim policies easy to pass. As a result, there were various clashes between people, especially Hindus and Muslims in India during the time the BJP was in power.

Keywords: Islamophobia in India, Narendra Modi, Bharatiya Janata Party, Hindutva, Galtung Violence Triangle

Abstrak

Dengan jumlah populasi mencapai 1.45 miliar penduduk, India berhasil menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia. Meskipun demikian, India yang sebelumnya melabeli negaranya menjadi negara sekuler, sampai saat ini masih menghadapi isu rasisme, Islamophobia. Akibatnya, banyak umat Muslim di India menghadapi diskriminasi di kehidupan sehari-hari baik dari masyarakat maupun dari pemerintah yang berkuasa. Dengan hindutva sebagai ideologi dari partai yang berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP), membuat masyarakat semakin menderita karena kebijakan yang dikeluarkan merampas hak-hak mereka sebagai warga negara. Penelitian ini akan melakukan identifikasi mendalam terkait mengapa pemerintah India di era Narendra Modi mengeluarkan kebijakan Islamophobia terhadap masyarakat Muslim India tahun 2014-2022. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor agama dan ideologi yang menjadi akar kekerasan kultural dan membuat kebijakan yang anti-Muslim mudah diloloskan. Akibatnya muncul berbagai bentrokan antar umat khususnya Hindu dan Muslim di India selama BJP berkuasa.

Kata kunci: Islamophobia di India, Narendra Modi, Bharatiya Janata Party, Hindutva, Segitiga Kekerasan Galtung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

India adalah negara yang terletak di Asia Selatan. India berbatasan dengan Laut Arab dan Teluk Benggala, di antara Myanmar dan Pakistan. Negara ini terkenal memiliki populasi penduduk yang sangat banyak. Tercatat pada tahun 2022, populasi penduduk di India mencapai 1.45 miliar dengan inti populasi bermukim di tepi sungai Gangga sebelah utara. Dengan ini, India menjadi negara kedua yang memiliki populasi penduduk terbanyak setelah China. India juga merupakan negara Hindu terbesar, Mayoritas penduduk negara India menganut agama Hindu dengan jumlah mencapai 79.8% dari total populasi. Diikuti dengan penduduk Muslim dengan 14.2%, Kristen 2.3%, Sikh 1.7%, dan sisanya tidak ditentukan 2%. (CIA, n.d.).

Namun, meskipun penduduk beragama Muslim merupakan penduduk urutan kedua dalam populasi masyarakat di India, mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka jika dibandingkan dengan penduduk beragama lain di India. Mereka mendapatkan perlakuan dan kekerasan yang saat ini disebut dengan Islamophobia. Islamophobia sendiri merupakan salah satu istilah yang cukup baru. Islamophobia termasuk ke dalam bentuk dari rasisme. Islamophobia terjadi karena adanya ketakutan dengan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh hubungan yang sangat panjang dan kompleks antara Islam dan Barat, mulai dari perang sektarian Eropa, Perang Salib, dan inkuisisi kapitalisme dan modernisasi Barat. Istilah ini semakin banyak digunakan setelah

adanya adanya penabrakan pesawat ke gedung WTC pada 9 September 2001. Terdapat anggapan bahwa agama Islam menjadi salah satu latar belakang mengapa teroris melakukan hal tersebut. Kejadian yang lebih dikenal dengan sebutan 9/11 ini membuat banyak orang memberikan stigma yang negatif kepada agama Islam seperti agama yang tidak baik, penghancur, dan berisikan orang-orang teroris. Ditambah dengan aktivitas organisasi kriminal transnasional ISIS yang mengaku berlandaskan ajaran Islam, menyebabkan terror dimana-mana semakin membuat agama Islam dipandang jelek. Terorisme sendiri dikecam oleh banyak negara. (Rana, 2007)

Di India, praktik islamophobia sudah dapat terlihat sejak lama. Tepatnya pada saat pemisahan negara India dan Pakistan. Sebelumnya, pada Mei 1857 kedua kelompok baik Hindu dan Muslim bersama-sama dalam melancarkan serangan nasional demi mendapatkan kemerdekaan mereka. Pada Desember 1906 terbentuk sebuah Liga Muslim India yang bertujuan untuk menjaga kepentingan komunitas Muslim minoritas di India dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai pemimpinnya. Kemudian terjadi pembantaian pada April 1919 yang lebih dikenal dengan pembantaian Amritsar yang menewaskan banyak orang sehingga Mohandas Gandhi melakukan upaya untuk memisahkan India dari Inggris. Terinspirasi dari Gandhi, Jawaharlal Nehru dari partai Kongres Nasional India juga mengkampanyekan kemerdekaan India dari Inggris. Pada tahun 1935 terjadi sebuah pengesahan Undang-Undang Pemerintah India yang membagi negara India menjadi beberapa wilayah yang dapat memerintah wilayahnya sendiri, meskipun belum menjadi sebuah negara yang merdeka. Kemudian karena adanya perbedaan yang mencolok antara Kongres Nasional India dan Liga Muslim India, Ali Jinnah membuat sebuah tuntutan untuk membuat

sebuah bangsa yang terpisah dari India. Pada Agustus 1946, terjadi sebuah aksi di Calcutta (Kolkata) yang menyerukan agar masyarakat Muslim melakukan *Direct Action Day*, sebuah aksi pemogokan dengan tujuan mendukung pembentukan negara baru yakni Pakistan. Hari itu terjadi sebuah kekerasan yang mengerikan antar umat Hindu dan Muslim dengan korban mencapai 4.000 orang tewas dengan 10.000 orang terluka. Atas desakan dari Ali Jinnah, Lord Louis Mountbatten yang saat itu menjadi seorang raja muda India, setuju membagi negara India walaupun sejatinya ia tetap mencoba untuk mempertahankan India. Kemudian, Pakistan mendapatkan kemerdekaannya pada 14 Agustus 1947 dan India pada sehari setelahnya yaitu pada 15 Agustus dengan garis batas negara yang masih belum diselesaikan. Perbatasan negara hanya ditandai di peta dan menggunakan sensus populasi minoritas dan mayoritas sehingga terjadi pembunuhan hingga mencapai 500 - 1 juta jiwa. Wilayah Kashmir merupakan wilayah yang sampai saat ini masih diperebutkan oleh kedua negara karena terletak di pegunungan Himalaya dan Karakorum yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kemudian pada 21 November 1947 terjadi migrasi besar-besaran antara masyarakat Muslim yang pergi ke Pakistan, sedangkan masyarakat Hindu dan Sikh ke India (Sarkar, 2017).

Konflik India - Pakistan ini menjadi awal mula kebencian umat Hindu dan Muslim muncul, konflik di kedua negara sulit untuk diselesaikan karena adanya beban sejarah, proses pemisahan yang rumit, peran agama, perbedaan ideologi antar negara dan nasionalisme yang berbeda. Setelah Inggris pergi dari Asia Selatan, kedua negara ini mendapatkan banyak konflik yang besar. Beberapa diantaranya adalah isu Sie Creek, Siachen, Wullar Barrage, terorisme, dan yang sampai saat ini belum

diselesaikan adalah sengketa Kashmir (Ashraf, 2018). Kebijakan kolonial Inggris dalam membagi India membuat sebuah *gap* antar umat Hindu dan Muslim. Hal ini membuat batasan antara umat agama Hindu dan Muslim di India.

Pada saat ingin mencapai kemerdekaannya, gerakan nasionalis sangat berkembang di India. sehingga, kekuatan kolonialisme, nasionalisme dan komunalisme sangat berpengaruh dan berkaitan dalam sejarah India. Konflik yang melibatkan masyarakat umat Hindu dan umat Muslim di India sudah terjadi sejak lama. Salah satunya terjadi pada Februari 2002 saat kereta tujuan Faizabad dan Ahmadabad di Gujarat dihentikan dan di bakar. Korban meninggal diperkirakan mencapai 59 dan sebagian besar merupakan umat agama Hindu. Walau fakta kejadian tersebut belum terungkap. Namun, sasaran tersangka atas kejadian tersebut dijatuhkan ke umat Muslim. Nama Narendra Modi juga terseret dalam kasus ini karena ia merupakan menteri Gujarat pada saat itu (Singh, 2009).

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta beberapa konvensi internasional lainnya, mengatakan bahwa seorang individu memiliki hakikat dan kodratnya untuk beragama dan hal tersebut melekat pada dirinya sendiri sehingga hak tersebut tidak boleh untuk dirampas maupun dicabut. Artinya masyarakat muslim India seharusnya secara prinsip diakui secara hukum. Kemudian, India sendiri telah meratifikasi atau mengadopsi nilai-nilai ICCPR atau Konvensi Internasional tentang hak Sipil dan Politik. Sehingga seharusnya mereka yang telah mengadopsi nilai sebuah konvensi harus mengimplementasikan nilai yang mereka adopsi. Namun, nilai negara India tidak mematuhi *State Responsibility*. Karena negara India tidak melakukan penghormatan atas hak sipil dan politik masyarakatnya. Mereka telah membeda-

bedakan masyarakatnya khususnya dalam kasus ini berdasarkan agama yang seharusnya tidak mereka lakukan karena mereka telah meratifikasi ICCPR. (Ramadhani, 2020)

Di tengah – tengah konflik agama yang semakin mendalam di India, pemerintah India mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan hijab bagi siswi Muslim di lingkungan pendidikan India. Kebijakan ini berasal dari pengadilan tinggi Karnataka yang memberikan pelarangan penggunaan hijab dengan alasan bahwa hijab bukan merupakan praktik yang penting dalam ajaran agama Islam, sehingga para siswa harus mengikuti seragam yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat, banyaknya mahasiswi Muslim serta aktivis Hindu melakukan demonstrasi. Karena demonstrasi ini membesar dan menyebar sampai ke wilayah yang lainnya, sekolah dipaksa tutup sementara. populasi agama Islam sejatinya berada di posisi kedua setelah agama Hindu. Beberapa orang menilai bahwa keputusan ini sama saja dengan melakukan tindakan diskriminatif atau bentuk dari intoleransi pemerintah India terhadap masyarakatnya sendiri. (Shih, 2022)

Para mahasiswi dan aktivis Hindu akan memperjuangkan hak mereka sampai ke Mahkamah Agung India. Dalam menjelaskan kebijakan ini, pengadilan tinggi Karnataka memberikan alasan bahwa penggunaan hijab bukanlah praktik yang penting dalam agama islam sehingga mereka percaya bahwa negara memiliki hak untuk mengatur seragam sekolah dan pelarangan ini merupakan hal yang wajar dan masuk akal pada hak konstitusional. Sedangkan di sisi yang lain terdapat mahasiswa — mahasiswi yang dapat mengekspresikan keagamaan mereka seperti menggunakan turban dan tilak (tanda di dahi untuk agama Hindu). Sehingga keputusan yang dibuat

oleh pengadilan tinggi Karnataka merupakan tindakan intoleransi serta sudah merampas hak untuk beragama terhadap mahasiswa Muslim (Deutsche Welle, 2022).

Bharatiya Janata Party (BJP) adalah salah satu partai politik yang besar di India bersama dengan Partai Kongres India. Partai BJP di bawah Narendra Modi telah memenangkan pemilu pada tahun 2014 dan pada tahun 2019. Pada tahun 2014, partai ini mendapatkan 289 kursi pada Lok Sabha (majelis parlemen tingkat rendah) dan pada tahun 2019 partai BJP berhasil mendapatkan 301 kursi dari 542 kursi. Sehingga BJP berhasil mendapatkan 55.74% jumlah kursi di Lok Sabha. (Parliament of India LOK SABHA, n.d.) Walaupun konstitusi dasar India adalah sekularisme, Partai BJP menganut Hindutva sebagai ideologi partainya. Hindutva sendiri adalah ideologi yang mendefinisikan budaya India dari nilai-nilai Hindu. Dengan adanya ideologi ini, partai BJP mengesahkan hijab ban di negara bagian India, Karnataka.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa pemerintah India di era Narendra Modi mengeluarkan kebijakan Islamophobia terhadap masyarakat Muslim India tahun 2014-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk melihat dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen India terhadap masyarakat Muslim India.

2. Untuk menganalisis parlemen India sebagai aktor yang melakukan kekerasan struktural.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pemerintah serta masyarakat India yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat Muslim di India atas dasar politik identitas.

Penelitian ini akan mengambil rentang waktu 2014 – 2022. Karena pada tahun 2014 merupakan waktu dimana pemilu dimenangkan oleh partai politik Narendra Modi yaitu Bharatiya Janata Party (BJP) yang memiliki ideologi Hindu. Narendra Modi yang menjadi perdana menteri India terkenal mengesahkan undang-undang yang dinilai diskriminatif terhadap kaum minoritas terutama Muslim. Sedangkan pemilihan tahun 2022 sebagai penutup dari cakupan penelitian dikarenakan alasan ketersediaan data. Pada tahun 2019, BJP kembali memenangkan pemilu di India sehingga Modi sudah berkuasa di pemerintahan selama 8 tahun.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Dalam penelitian yang ditulis oleh Thameem Ushama dengan berjudul *“Islamophobia in India: An Exploration of its Roots, Rise and History”* memaparkan bahwa Islamophobia merupakan produk fasis Hindu yang sudah ada sejak lama. Para pendukung Hindutva (sebuah ideologi yang

digunakan oleh partai India) yang menjadi akar permasalahan dan membuat Muslim dikesampingkan. Dalam penelitian ini juga memaparkan tindakan kekerasan seperti pembunuhan genosida, penghancuran masjid, maupun tindakan politik yang menyingkirkan Muslim dari India yang disebabkan oleh Individu, pemerintah atau pemimpin politik, partai politik, serta organisasi Hindu yang ada di India. Ideologi Hindutva ini juga diambil menjadi ideologi yang digunakan oleh partai Bharatiya Janata (BJP) dalam melaksanakan pemilihan parlemen pada tahun 2019 lalu, mereka menggunakan slogan “*India for Hindus only*”. Mengakibatkan masyarakat minoritas terutama Muslim menjadi terprovokasi. Permusuhan antara masyarakat Hindu dan Muslim di India juga semakin membesar setelah adanya pemisahan di masyarakat. India yang mayoritasnya agama Hindu dan Pakistan yang mayoritas beragama Muslim. Namun, penelitian ini tidak mencantumkan Modi sebagai salah satu aktornya. Sehingga penelitian penulis akan mencoba menyelidiki keterkaitan Modi dengan kasus yang ada di India.

Penelitian kedua dengan judul “*Hate Crimes against Muslims and Increasing Islamophobia in India*” ditulis oleh Shabbir Hussain, dkk. Dalam penelitian tersebut, Shabbir dkk menjelaskan kejahatan-kejahatan di India terhadap Muslim meningkat setelah adanya insiden-insiden Islamophobia. Bentuk dari kejahatan tersebut mulai dari diskriminasi sosial, kekerasan fisik, pelecehan, bahkan sampai melakukan pembunuhan Muslim. Tulisan ini memaparkan konflik yang terjadi antara kelompok agama Hindu dan Muslim di India mengalami peningkatan setelah adanya pemisahan pada tahun 1947 karena berbagai faktor. Seperti sosial, ekonomi, politik, dan juga agama. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini akan membahas ideologi

politik yang ada di India, stratifikasi sosial atau sistem kelas yang ada di dalam masyarakat, diskriminasi sosial dan kekerasan yang dihadapi kelompok Muslim, dan proses peminggiran kelompok atau marginalisasi kelompok Muslim dari sosial masyarakat. Penelitian ini juga membahas bahwa sebuah negara akan berkembang jika mereka dapat meningkatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini berarti kelompok-kelompok terkucilkan atau minoritas seharusnya juga mendapat perhatian dari pemerintah. Namun, hal tersebut tidak terjadi di India karena masyarakat minoritas terutama Muslim malah dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan suara pada pemilu oleh partai-partai politik. Penelitian ini belum mengaitkan hubungan islamophobia yang ada di India dengan partai BJP sehingga penelitian penulis akan mencoba mencari hubungan antara besarnya kasus islamophobia dengan partai BJP

Serta jurnal dengan judul “*Phobia of Religion: Religion as Islam a Political argument and a psychoanalytic inquiry of Islamophobia in India*” oleh Zehra Mahdi. Pada jurnal tersebut, Mehdi memaparkan bahwa India merupakan negara sekuler sehingga ketakutannya bukan menasar kepada Islam, tetapi Agama. Dan agama tersebut diidentikkan dengan Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya benturan antara identitas nasional dan identitas agama. Sehingga orang Muslim di India tidak bisa menjadi orang India selama mereka memiliki identitas Muslim, dan sejatinya mereka tidak bisa tidak menjadi Muslim. Membuat mereka harus melepaskan agama demi mendapatkan hak kewarganegaraan. Penelitian ini juga mengangkat tentang *Clash of Civilization* yang berarti kasus yang terjadi di kasus yang terjadi di India bukan mengenai ras, namun kebangsaan. Kemudian karena para penduduk asli menganggap bahwa mereka adalah pemilik asli dari India maka merekalah yang seharusnya menjaga

warisan dan budaya India. Sehingga orang yang bukan penduduk asli jika mereka tidak dapat melakukan asimilasi dengan budaya yang ada maka mereka harus diusir. Penelitian ini menggunakan *clash of civilization* sebagai kerangka pemikiran dalam melihat kasus islamophobia, sedangkan penelitian penulis akan mencoba melihat kasus di India dari kacamata segitiga kekerasan oleh Galtung.

Muhammad Waqas Sajjad melakukan penelitian kebijakan perdana menteri Modi. pada penelitian dengan judul “*Examining the State of Muslim Minority under Modi’s BJP since 2014*”, Waqas berpendapat bahwa selama partai BJP berkuasa, mereka menyebabkan penganiayaan dan kejahatan komunal lainnya terhadap kelompok minoritas terutama Muslim. Kejahatan ini juga didukung oleh organisasi dan aktor-aktor sayap kanan contohnya Veer Savarkar. Savarkar berpendapat bahwa India seharusnya dimiliki oleh bangsa Hindu, sehingga ia melihat Muslim sebagai pihak luar. Dalam hal ini, ia juga mengatakan bahwa Akhand Bharat (penyatuan negara India kembali) dapat tercapai dengan Hindutva. Dengan ideologi inilah BJP berhasil memperkuat perspektif ekstrimis di masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki cakupan 2014-2018 dimana dalam rentang waktu tersebut BJP memenangkan pemilunya yang pertama. Sehingga penelitian penulis akan mencakup 2014-2022 karena pada tahun 2019 BJP kembali memenangkan pemilu yang kedua.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep kekerasan oleh Johan Galtung sebagai alat dalam menganalisis studi kasus yang diambil. Fungsi konsep ini akan menjadi panduan penulis dalam hal menganalisa dan sebagai kerangka pemikiran untuk menjelaskan suatu fenomena.

- Konsep Kekerasan oleh Johan Galtung

Kekerasan merupakan hal yang dapat terjadi kapan saja. Johan Galtung berpendapat bahwa terdapat tiga bentuk kekerasan yaitu *direct violence*, *cultural violence*, dan *structural violence*. Kekerasan-kekerasan ini akan menyebabkan luka yang dalam serta trauma yang sulit untuk disembuhkan oleh seseorang. Kekerasan langsung (*direct violence*) merupakan kekerasan yang secara langsung dilakukan oleh seseorang. Seperti pemukulan, perampasan kesehatan, perang, bahkan yang paling ekstrim adalah pembunuhan (Galtung, 1969). Sehingga biasanya kekerasan langsung dilakukan secara fisik serta dapat diukur dari jumlah kematian pada kasus tersebut.

Kekerasan struktural (*structural violence*) dapat diartikan dengan ketidakadilan sistematis yang menyebabkan kemampuan masyarakat untuk tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga menyebabkan munculnya rasa tidak aman baik fisik maupun psikologis yang disebabkan oleh institusi tertentu seperti pemerintah yang otoriter dan dapat membahayakan kelompok tertentu. Bentuk dari kekerasan ini seperti eksploitasi, diskriminasi usia, adanya kelas dalam masyarakat, etnosentrisme (menganggap bahwa budaya yang mereka miliki lebih baik dari budaya yang lain),

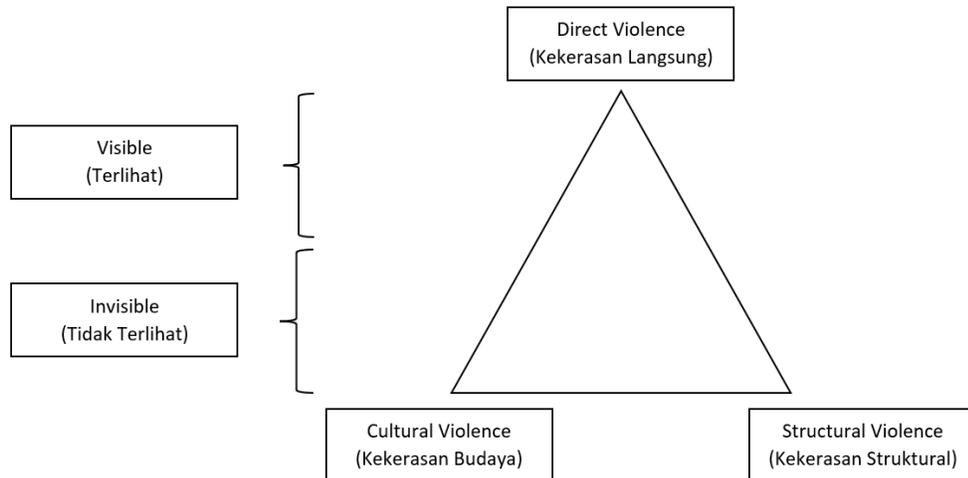
rasisme (menganggap ras atau bangsa yang dimiliki lebih baik dari yang lain), sexism (diskriminasi terhadap jenis kelamin seseorang). Hal ini dapat terjadi karena adanya ketimpangan distribusi kekuasaan dan berakibat kepada ketidaksetaraan di masyarakat (Galtung, 1969).

Kekerasan budaya (*cultural violence*) berkaitan dengan aspek-aspek kebudayaan seperti agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu empiris, ilmu formal dan kosmologi. Beberapa contoh yang dapat terlihat adalah dengan penggunaan simbol simbol seperti bintang, salib, bulan sabit, bendera, lagu kebangsaan, foto pemimpin di segala tempat, serta hal-hal lainnya yang masuk kedalam pikiran seseorang dan dapat menghasut orang tersebut. Kekerasan budaya ini membuat kekerasan langsung dan kekerasan struktural terlihat benar atau dianggap tidak sepenuhnya salah oleh masyarakat (Galtung, 1990).

Dalam pengertian dari kekerasan, Galtung mengenalkan *violence triangle*. Dalam segitiga tersebut terdapat kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung masuk kedalam *visible violence*, sedangkan kekerasan struktural dan kekerasan kultural masuk kedalam *invisible violence*. Hal ini dikarenakan kekerasan langsung dapat dilihat secara langsung baik perilaku maupun dampak yang dihasilkan seperti adanya korban yang meninggal, terluka akibat kekerasan, masyarakat yang terlantar, kerusakan material, dan juga adanya kekerasan terhadap warga sipil. Sedangkan kekerasan struktural dan kekerasan budaya tidak demikian. Kekerasan tersebut sulit untuk dilihat dan diukur. Serta kedua kekerasan ini tidak hanya membekas pada tubuh namun juga jiwa. Contohnya eksploitasi,

diskriminasi usia, *classism* atau adanya sistem kelas dalam masyarakat, ethnocentrism, racism, sexism, dan lain sebagainya (Galtung, 2004).

Gambar 1: Violence Triangle oleh Galtung



Sumber: (Galtung, 2004)

Kekerasan langsung tidak mungkin muncul begitu saja. Terdapat alasan mengapa terjadi kekerasan langsung yaitu adanya kekerasan budaya ataupun kekerasan struktural yang terjadi. Serta kekerasan langsung dapat memperkuat kekerasan struktural dan budaya. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang yang kalah dendam dan ingin melakukan balas dendam. Kemudian ia akan mencari jalan lain selain dengan melakukan kekerasan langsung (Galtung, 2004).

Dalam studinya, Galtung juga menjelaskan mengenai tipologi dari kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Tabel I: Tipologi Kekerasan

	Kebutuhan untuk bertahan hidup	Kebutuhan kesejahteraan	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan kebebasan
Kekerasan Langsung	Pembunuhan	Melukai, Pengepungan, Sanksi, Penderitaan.	Desosialisasi, Resosialisasi, Warga negara sekunder	Penahanan, Represi, Pengusiran
Kekerasan Struktural	Eksplorasi A	Eksplorasi B	Penetrasi, Segmentasi	Marginalisasi, Fragmentasi

Sumber: (Galtung, 1990)

Resolusi kekerasan struktural dapat dilakukan dengan mengubah sikap atau “peace-building” yaitu terdapat pihak ketiga duduk bersama dengan pihak yang berkonflik dan membicarakan bagaimana menyelesaikan konflik. Contoh bentuk penyelesaiannya dapat seperti mengeluarkan perjanjian ataupun gencatan senjata.

1.7 Argumen Sementara

Sebagai otoritas tertinggi dalam sebuah negara, sudah seharusnya parlemen India dapat melindungi seluruh hak masyarakat India tanpa terkecuali. Namun, parlemen India tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yang dinilai diskriminatif atau anti-Muslim terhadap masyarakat Muslim yang berada di India. Kebijakan ini juga didukung oleh partai besar di India dan

masyarakat beragama Hindu di India yang memiliki sifat rasisme terhadap masyarakat Muslim India.

Jika dilihat dari segitiga kekerasan Galtung, alasan parlemen India mengeluarkan kebijakan diskriminatif tidak terlepas dari pengaruh partai yang mendominasi parlemen India. BJP party merupakan partai yang mendominasi parlemen India setelah kemenangan mereka pada pemilu tahun 2014. Dengan kebanyakan anggota BJP yang merupakan penganut agama Hindu serta ideologi partai BJP yaitu Hindutva menjadi alasan mengapa parlemen India dapat dengan mudah meloloskan kebijakan-kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap masyarakat Muslim India.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Peneliti akan melakukan teori dan konsep yang ada untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah. Penelitian kualitatif berupaya memaparkan secara naratif hal yang dilakukan dan dampak yang terjadi dalam kehidupan, penelitian kualitatif juga ingin mencapai tujuan untuk mendapatkan pengertian yang spesifik mengenai masalah sosial, serta penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik. Namun dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan akan menggunakan pengumpulan data literatur, analisis, kemudian diinterpretasikan. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dari buku, jurnal, artikel, maupun riset terdahulu

(Fadli, 2021). Setelah melakukan analisa, peneliti akan memaparkan hasil secara deskriptif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini akan berfokus kepada pemerintah India sebagai aktor yang melakukan kekerasan struktural kepada masyarakat Muslim di India.

Objek dari penelitian ini adalah kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah India yang dinilai diskriminatif terhadap masyarakat Muslim di India.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data penelitian berasal dari data sekunder seperti jurnal, artikel, situs website, maupun berita terkait penelitian. Peneliti juga akan mempelajari, mengutip, menganalisa, dan memasukkan teori atau konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.8.4 Proses Penelitian

- Pra-Pendahuluan = peneliti mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan jurnal ataupun *website* terkait yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan
- Pengolahan data = peneliti akan melakukan pemilihan data yang sudah dikumpulkan agar sesuai dengan penelitian
- Analisis data = peneliti menganalisis data yang sudah di pilih, mengaplikasikan teori dan konsep dalam penelitian

- Kesimpulan = peneliti menarik kesimpulan dan rekomendasi

1.9 Sistematika Pembahasan

- a. Bab I: Bab I akan berisikan bagian pendahuluan seperti penjelasan umum mengenai permasalahan yang ingin dibahas, latar belakang penelitian, serta rumusan masalah yang ingin dibahas, tujuan penelitian, cakupan penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
- b. Bab II: Pada Bab II penelitian ini akan berisikan mengenai siapa dan latar belakang politik dari Narendra Modi, sejarah terbentuknya Bharatiya Janata Party (BJP), dan kehidupan masyarakat Muslim di India.
- c. Bab III: Pada bab III peneliti akan memaparkan hasil dari analisis dan pembahasan berdasarkan konsep segitiga kekerasan oleh Galtung yakni *Cultural Violence, Structural Violence, dan Direct Violence*.
- d. Bab IV: penutup yang berisikan kesimpulan hasil dari penelitian, menegaskan kembali secara singkat hasil dari penelitian berdasarkan rumusan masalah, serta menyertakan rekomendasi untuk penelitian berikutnya

BAB II

DINAMIKA KEPEMIMPINAN MODI DI INDIA

Dengan kemenangan Modi sebagai Perdana Menteri di India membawa angin perubahan di negara India. Sebagai seseorang dengan sifat yang dinamis dan berdedikasi teguh, memiliki gagasan dan ide inovatif, akan membawa roda pembangunan dengan cepat dan hasilnya sampai ke setiap masyarakat India. Namun, karena Ia masuk dalam partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang memiliki ideologi politik *hindutva* membuat masyarakat Muslim di India menderita sejak naiknya Modi di kursi Perdana Menteri.

2.1 Kiprah Narendra Modi di Kancah Politik India

Narendra Damodardas Modi atau lebih dikenal dengan sebutan Narendra Modi adalah perdana menteri terlama menjabat di luar Kongres Nasional India. Modi memulai jalannya di perpolitikan sejak umur delapan tahun dimana Ia diperkenalkan dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang merupakan sebuah organisasi sayap kanan sukarelawan atau patriotik nasional, RSS dianggap menjadi organisasi utama pemerintahan di India seperti partai Bharatiya Janata. Saat Modi mengikuti pelatihan lokal (disebut *shakhas*), Modi bertemu dengan Lakshman Rao Inamdar atau lebih dikenal dengan Vakil Saheb yang memperkenalkannya dengan *bal swayamsevak* (sebuah kegiatan dari RSS) untuk menjadi *junior cadet*. (Pathak, 2001).

Dengan keteguhan dan pengabdian tulusnya yang besar kepada organisasi RSS, para petinggi RSS terkesan dengan Modi, ditambah dengan bakat yang Modi miliki

sejak kecil. Sehingga setelah menyelesaikan studinya di Universitas Delhi, Modi secara aktif terjun di dunia politik. Ia mendapatkan jabatan-jabatan yang besar pada awal ia memasuki perpolitikan seperti menjadi *general secretary* di RSS committee (*Gujarat Lok Sangharsh Samiti*) dan pada 1987 ia bergabung di partai BJP menjadi sekretaris jenderal unit Gujarat selama satu tahun. Pada tahun 2001, Modi dipilih untuk dapat menggantikan ketua menteri Gujarat, Keshubhai Patel, karena Patel yang saat itu memiliki kesehatan yang buruk (Deccan Herald, 2019).

Pada tahun 2002, terdapat sebuah kejadian yang menyeret nama Narendra Modi. Modi mendapatkan tuduhan keterlibatannya dalam insiden terbakarnya kereta api di Gujarat. Kereta api itu berisikan peziarah Hindu yang membawa mereka dari Ayodhya setelah melakukan upacara di Babri Masjid. Kebakaran ini terjadi di distrik Godha dan menewaskan ratusan umat Hindu dan umat Muslim. Namun, karena kekurangan bukti kasus ini ditutup oleh *Supreme Court*. Meskipun demikian, terdapat banyak kritik yang ditujukan kepada Narendra Modi. Modi memenangkan pemilihan dengan telak di Gujarat di *Legislative Assembly elections* dan kembali memenangkannya di tahun 2012. Ia disukai oleh masyarakat karena dengan model pembangunannya, bisnis dan industri yang ada di Gujarat berkembang dengan pesat sehingga menaikkan perekonomian Gujarat (Deccan Herald, 2019).

Narendra Modi mengambil sumpah sebagai PM (Perdana Menteri) pada 26 Mei 2014. Dengan sifatnya yang dinamis, berdedikasi dan teguh, Sejak Modi menjabat sebagai PM, Ia melakukan banyak pembangunan inklusif yang menyeluruh dimana masyarakat dapat secara bebas untuk mencari, menyadari, dan mewujudkan harapan dan aspirasi mereka. Dengan membawa prinsip *Antyodaya* (melayani orang terakhir

dalam antrean). Di bawah kepemimpinannya ia mengeluarkan gagasan dan ide inovatif, pemerintah memastikan bahwa roda pembangunan bergerak dengan cepat dan hasilnya akan sampai ke setiap masyarakat India, pemerintah menjadi lebih terbuka, mudah, dan transparan (Modi, n.d.).

2.2 Urgensi dan Ideologi Partai Bharatiya Janata Party (BJP) di India

Sebelum terbentuknya Bharatiya Janata Party seperti yang dikenal saat ini, Dr. Syama Prasad Mookerjee membentuk Bharatiya Jana Sangh pada 21 Oktober 1951 di *Raghomal Girl High School* dan menjadi pemimpin pertama partai tersebut. Pada tahun selanjutnya partai ini memenangkan 3 kursi pada pemilihan umum India. Namun, pada tahun 1953 Syama Mookerjee ditangkap karena memimpin gerakan di Isu Kashmir dan dipenjara hingga meninggal di Kashmir. Kemudian pada tahun 1957 partai ini memenangkan 4 kursi, dan memenangkan 14 kursi di Lok Sabha pada tahun 1962. Pada tahun 1967 partai ini muncul sebagai partai terbesar kedua di Uttar Pradesh setelah meraih 35 kursi di Lok Sabha, dan memenangkan 22 kursi Lok Sabha pada 1971. Terjadi penggabungan antara Bharatiya Jana Sangh dengan partai lainnya dan menjadi Janata Party di tahun 1977. Namun, karena partai ini tidak mencapai tujuannya dengan hanya memenangkan 31 kursi dan adanya larangan anggota memiliki keanggotaan ganda pada partai dan RSS, mantan anggota Jana Sangh membentuk partai politik baru pada 6 April 1980 dengan nama Bharatiya Janata Party (Bharatiya Janata Party, n.d.).

BJP masuk ke dalam kelompok Sangh Parivar. Sebuah kumpulan kelompok yang dipimpin oleh RSS. Di dalam Sangh Parivar terdapat kelompok atau partai lainnya seperti Vishva Hindu Parishad (VHP), Bajrang Dal, Akhil Bharatiya Vidyarthi

Parishad (ABVP), dan yang lainnya (Hindutvawatch, n.d.). Karena keberadaan BJP yang dibawah RSS, maka Modi tidak dapat menentantang atau melawan otoritas RSS. ia akan dengan mudah menjalani perintah otoritas RSS. hal ini juga merupakan strategi RSS yang ingin mengubah India dengan visinya *Hindu Rashtra* (nasionalisme Hindu). Walaupun pernah terlihat beberapa kali berselisih dengan RSS dan ingin terlihat tidak mengejar agenda RSS, namun Modi tetap membutuhkan dukungan dari RSS (Srivastava, 2014). Sangh parivar juga dapat dikatakan sebagai fasisme. Argumen sangh parivar mengatakan bahwa Hindutva lebih superior dibandingkan Islam dan Kristen. Sehingga kepentingan hindu harus selalu menang di India hingga mencapai *Rashtra Hindu* (Sarkar, 1993).

Partai BJP terbentuk atas beberapa prinsip dan kekuatan dimana kekuatannya bukanlah berasal dari individu atau pemimpin, bukan juga berasal dari keluarga atau kelas. Melainkan berasal dari masalah yang ada di masyarakat dan agama. Terdapat sebuah tema di BJP yaitu *Bharat Mata Ki Jai*. *Bharat* berarti tanah kami, *Mata* berarti warisan dan budaya kami, serta *Jai* yang berarti aspirasi masyarakat. Mereka berpendapat bahwa bangsa muncul dari kesatuan tanah, manusia dan budaya serta keyakinan pada nasionalisme budaya. Partai ini terbentuk karena Syama Prasad Mookerjee tidak ingin Benggala ikut menjadi bagian Pakistan Timur saat adanya pembagian di India. Bersama dengan RSS yang menentang pemisahan tersebut, mereka melakukan penyelamatan masyarakat Hindu-Sikh dari masyarakat Muslim yang kejam selama pemisahan (Bharatiya Janata Party, n.d.). Terdapat *Pancha Nishthas* atau lima prinsip panduan politik BJP, yaitu:

1. Komitmen terhadap nasionalisme dan integrasi nasional.

2. Komitmen terhadap demokrasi.
3. Komitmen terhadap Sosialisme Gandhi.
4. Komitmen terhadap sekularisme positif.
5. Komitmen terhadap politik berbasis nilai.

Ideologi yang dianut oleh partai BJP adalah Hindutva. Hindutva diperkenalkan pertama kali diperkenalkan oleh Chandranath Basu pada 1890 di Bengal dan diartikulasikan oleh Vinayak Damodar Savarkar pada 1920. Dimana Hindutva berpusat pada tema bahwa umat Hindu membentuk sebuah bangsa berdasarkan identitas mereka yang terletak dalam batas-batas geografi nasional. Savarkar mengatakan bahwa umat Hindu bukanlah perjanjian negara, namun makhluk nasional organik. Sedangkan Muslim india mengidentifikasikan diri mereka sebagai kepentingan dengan Muslim di luar India. Kaum nasionalis Hindu memiliki cita-cita untuk membangun komunitas Hindu dari semua kasta, sub kasta, dan orang buangan bersama dengan agama minoritas seperti Sikh, Budha, dan Jain yang dianggap sebagai pribumi. Sedangkan Muslim dan Kristen dianggap sebagai masyarakat asing. Meskipun demikian, dalam kenyataannya terdapat banyak konflik antar hubungan antara Hindu dengan Sikh, Budha, dan kasta rendah Hindu (Ansari, 2016).

Kemudian, para aktor Hindutva menanamkan kan rasa takut, putus asa dan sikap kalah ketika berhadapan dengan masyarakat asing (Muslim dan Kristen) sehingga mereka membuat gerakan anti-Muslim dan anti-Kristen karena mereka menganggap bahwa masyarakat asing sedang mengepung negara dengan bahaya dan membawa rencana anti-nasional sehingga mereka harus mempertahankan solidaritas dengan bersama-sama. Para pendiri Hindutva memaksakan kampanye-kampanye seperti

gerakan *shuddhi* (gerakan keagamaan untuk mengkonversi agama non-hindu India kembali ke agama Hindu) dan juga menggalang komunitas mayoritas dengan agenda homogenisasi-nya dengan wacana ketidaknyamanan dan urgensi untuk memperbaiki kesalahan sejarah karena orang asing. Wacana ini membuat umat Hindu harus bangga dengan identitas mereka dan membuat narasi ketakutan tentang budaya asing seperti Muslim yang mengacu pada perintah Al-Quran tentang jihad dan kebangsaan Muslim. Sehingga, wacana ini merusak persatuan Hindu-Muslim dan menyerukan pembersihan buku-buku sejarah yang merujuk pada perpecahan Hindu-Muslim sebagai warisan dari pemerintahan Inggris. Kebencian terhadap Muslim ini membuat banyak narasi-narasi mengenai agresi muslim selama seribu tahun dan melabeli Muslim sebagai ‘evil invaders’ (Ansari, 2016).

2.3 Kehidupan Masyarakat Muslim di India

India secara historis memiliki keunikan nilai budaya dan peradaban yang dihasilkan dari rasa hormat atau toleransi, asimilasi, integritas dan adaptasi dari berbagai agama. Namun, itu semua terancam karena ada ancaman dari partai politik sayap kanan. Integritas islam yang disebut sebagai islamophobia dipimpin oleh politik sayap kanan. Asimilasi keagamaan sering terjadi di kehidupan sehari-hari sehingga mudah untuk mengabaikannya. Kemudian terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok politik, organisasi budaya, dan media yang menghasilkan narasi menjelekkan Islam dan Muslim, seperti yang terjadi di Barat. Akibat dari narasi ini memunculkan islamophobia di masyarakat India. Identitas menjadi hal yang penting dalam politik di India (“Introduction to the Second Edition,” 2012).

Islamophobia merupakan salah satu jenis rasisme yang terjadi karena adanya rasa ketakutan dan kekurangan dari sosial dan ekonomi. India sendiri merupakan bekas jajahan Inggris yang memiliki sejarah kelam dengan Islam. Islamophobia mengacu pada ketakutan dan kebencian yang berlebihan terhadap Islam dan Muslim. Beberapa orang juga mengatakan bahwa islamophobia merupakan prasangka buruk budaya dan diskriminasi berbasis agama. Agama Islam di beberapa tempat dilihat sebagai praktik budaya. (Rana, 2007).

Identitas dimanipulasi untuk penghargaan, hadiah, pengucilan, penolakan, hukuman, *stereotype*, kekerasan, bahkan pembunuhan. Serta, kehidupan komunitas di india yang tidak berhubungan dengan komunitas yang lain membuat adanya pengelompokan atau kotak-kotak di masyarakat serta membagi masyarakat India menjadi beberapa bagian. Dibandingkan dengan kelompok yang lain, para penganut sayap kanan mengklaim bahwa pertumbuhan populasi muslim dapat mengancam dominasi Hindu di India karena tingkat pertumbuhannya yang tinggi, seperti pada 2001-2011 pertumbuhan penduduk Muslim mencapai 24,6%, berbeda 8% dengan pertumbuhan penduduk Hindu pada waktu yang sama dengan nilai 16,8% (“Introduction to the Second Edition,” 2012).

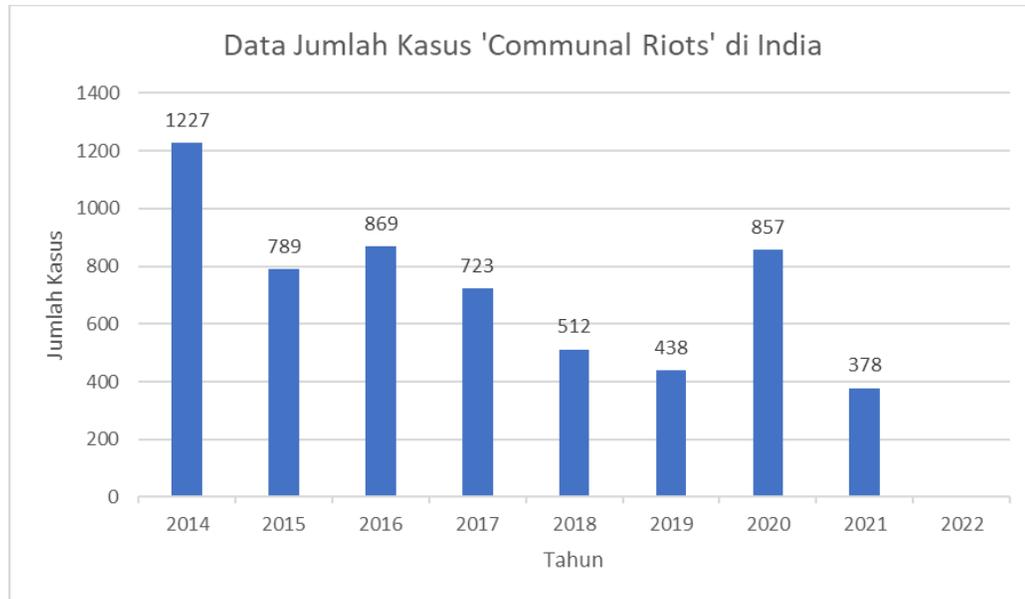
Meskipun demikian, negara gagal dalam memfasilitasi masyarakat muslim dan gagal dalam memperlakukan serta memberdayakan masyarakat Muslim yang ada di India. Hal ini dapat terlihat dengan masyarakat Muslim di India sebagian besar berasal dari narapidana, pengemis, orang yang tidak memiliki tanah, menjadi penduduk kumuh di kota-kota besar, bahkan mereka juga dapat terbunuh dalam kerusuhan komunal yang sering terjadi di India. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Muslim seperti “apakah

Muslim bisa menjadi bagian dari masyarakat India” masih ada sejak 1947, tepatnya saat terjadi pembagian negara India dan Pakistan (“Introduction to the Second Edition,” 2012).

Kekerasan ini berlangsung tanpa adanya pencegahan dan hukuman dari negara membuat masyarakat muslim lemah secara materi. Hal ini menunjukkan partai politik dari suatu negara lebih memilih untuk melakukan hal-hal strategis dan menguntungkan dibandingkan melakukan hal yang benar secara hukum dan konstitusional demi mendapatkan perhatian dan suara dari masyarakat. Tidak ada kebijakan, undang-undang yang secara signifikan diberlakukan untuk menghentikan kekerasan komunal. Institusi negara seperti polisi, peradilan, badan intelejen, dan yang lainnya dapat melakukan kekerasan yang lebih besar dan bias saat menghadapi kasus penduduk Muslim (“Introduction to the Second Edition,” 2012).

Karena Islamophobia yang meluas di India, masyarakat Muslim menghadapi masalah identitas, keamanan dan kesetaraan di kehidupan masyarakat mereka. Mayoritas umat muslim merasa bahwa identitas mereka tidak diakui, merasa tidak aman, dan tidak mendapatkan hak-hak dasar jika dibandingkan dengan kelompok India lainnya. Pemerintah BJP melakukan bentuk krisis identitas dan ketidakamanan dalam hidup umat Muslim hampir diseluruh bagian negara India. Hal ini menandakan bahwa umat Muslim mengalami kerugian lebih besar dibandingkan dengan kelompok agama lainnya di India (Hussain et al., 2019,).

**Grafik I: Gambar Data Kekerasan Komunal di India semenjak BJP
menang**



Sumber: (National Crime Records Bureau, n.d.)

Dari grafik diatas, terdapat kekerasan komunal yang besar terjadi semenjak Modi dibawah partai BJP berkuasa. Data ini merupakan rangkuman dari *annual report* dari *National Crime Records Bureau* (NCRB) India, dan data pada tahun 2022 belum diterbitkan. Namun, salah satu portal berita, The Hindu, mengabarkan pada enam bulan pertama tahun 2022 kekerasan komunal sudah mencapai sebanyak 71 kasus (Singh, 2023).

Banyak masyarakat Muslim yang tidak percaya kepada Modi saat ia naik pemilu tahun 2014 karena trauma dengan kerusuhan yang terjadi di Gujarat tahun 2002. Modi dituduh secara tidak langsung memiliki andil dalam kerusuhan tersebut karena mendukung umat Hindu (Reuters, 2014). Di sisi lain, beberapa orang khawatir dengan hubungan Modi dan RSS akan mempengaruhi pemikiran Modi dalam mengambil dan

membuat kebijakan. Umat Muslim mereka memilih Modi bukan karena agamanya namun karena menginginkan perubahan pada negaranya (SOLANKI, 2014). Di negara Pakistan, Modi tidak disukai karena masyarakat Pakistan menilai Modi sebagai seorang politisi yang tidak hanya anti Pakistan, namun juga sebagai anti Muslim dan Hindu fanatik (Shams, 2014).

Pada Desember akhir tahun 2014, seorang Sajan dari Ambheta mengirimkan pesan kasar dan berbau pornografi mengenai Nabi Muhammad pada aplikasi Whatsapp. Hal ini memicu kemarahan pada komunitas muslim dan membuat Patel ditangkap oleh polisi. Walaupun ia dilepaskan pada Januari 2015. Pada bulan yang sama, terdapat pembersihan etnis pada keluarga Mohammed Gulam Hafiz Danavala di desa Katpor. Mereka didatangi segerombolan umat Hindu dan memaksa mereka untuk masuk ke agama Hindu atau meninggalkan desa tersebut. Terjadi bentrokan antar Umat Hindu dan Muslim pada 14 Januari di festival panen dan mengakibatkan bentrokan antar kelompok sampai menewaskan dua umat Hindu dan satu umat Muslim (Chauhan, 2015).

Pada tahun 2016, saat umat Muslim merayakan Maulid Nabi di Dhulagarh diluar ibu kota bagian Kolkata terjadi perubahan rute melewati lingkungan Hindu. Saat melewati lingkungan Hindu, terdapat komentar-komentar yang berujung menjadi kekerasan. Dua toko jahit milik umat Islam diserang oleh kelompok Hindu dan dibakar dan pasar dijarah (Newslaundry, 2016). Sedangkan polisi pada saat itu datang terlambat dan hanya berdiri dan melihat keadaan, tidak berusaha menghentikan massa yang merusak rumah, mereka mengatakan agar umat Muslim untuk pergi meninggalkan tempat tinggal dalam dua menit (Kundu, 2016).

Pelarangan penyembelihan sapi kembali marak terjadi di era Modi. Organisasi Hindu nasionalis bermunculan di berbagai negara bagian dan melakukan main hakim sendiri atas nama Hindu dan menyerang praktik Muslim dan Dalit yang merupakan kelompok minoritas. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung India menengguhkan undang-undang mengenai penjualan dan penyembelihan hewan ternak secara nasional. Namun, karena setiap negara bagian memiliki hak konstitusional sendiri, mereka bisa menegakkan undang-undang sendiri mengenai penyembelihan ternak. Pasal 48 Konstitusi India menyatakan, negara mengatur pertanian dan peternakan modern, melestarikan dan meningkatkan perkembang biakan, melarang pematangan sapi, anak sapi, sapi perah, dan sapi penarik (Ahuja, 2019).

Bentrokan antar umat Hindu dan muslim kembali terjadi pada tahun 2018 saat festival kelahiran dewa Rama. Bentrokan selama dua hari antar partai BJP dan Kongres Trinamool menewaskan empat orang dan puluhan orang terluka. Menteri pemerintah federal BJP di Bengal Barat menuduh Muslim sebagai dalang dan mengatakan bahwa umat Muslim sebagai preman dan menarik umat Hindu keluar dari rumah mereka dan membakar toko-toko (Kuwait Times, 2018). Di sisi lain, terdapat tuduhan bahwa dalang dari bentrokan ini adalah hasutan dari kelompok nasionalis Hindu atau Hindutva dan pejabat dari partai BJP (Al Jazeera, 2018).

Masyarakat umat Muslim di India dibuat khawatir dengan adanya Citizenship Amendment Act (CAA) yang disahkan oleh parlemen India di tahun 2019. CAA ini memberikan kewarganegaraan bersyarat kepada penduduk minoritas yang teraniaya dan sudah tiba di India sebelum 2015 baik dari Hindu, Sikh, Kristen, Jain, Parsi dan berasal dari 3 negara muslim yakni Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Namun,

agama Islam tidak ada dalam daftar tersebut bersama dengan kelompok teraniaya lainnya. Walaupun mereka telah tinggal selama bertahun-tahun di India, mereka tidak dapat memperoleh kewarganegaraan India. Pencari suaka Muslim juga dinilai sebagai imigran ilegal dan penduduk Kashmir dan jutaan Muslim miskin di India tidak memiliki akses untuk memverifikasi keberadaan historis mereka. Untuk meningkatkan persetujuan terhadap CAA, pemerintah BJP meluncurkan kampanye pro-CAA online dan offline yang sistematis dan mengatakan protes anti-CAA sebagai pengkhianat dan anti nasional. Protes ini berlanjut ketika pemimpin dan menteri BJP mengecam para pengunjung rasa dengan pidato kebencian terhadap muslim, seruan *goli maaro saalo ko* (tembak para pengkhianat) muncul. Dalam pidato tersebut, protes dinilai sebagai anti-Hindu dan muncul narasi umat Muslim menghalangi tindakan kewarganegaraan dan kepentingan nasional. Narasi ini disebarluaskan melalui berbagai media sosial (Amarasingam et al., 2022). Narasi tersebut berisikan 4 gagasan utama yaitu:

- a. Kerusuhan bukanlah anti-Muslim, namun bentrokan antar dua kelompok, disini Hindu juga menderita
- b. Kerusuhan ini terorganisir dan direncanakan oleh umat Islam untuk menjelekkan Modi dan pemerintah secara internasional
- c. Protes anti-CAA didanai oleh kelompok Muslim
- d. ISIS dan teroris lainnya memiliki andil dan merencanakan kekerasan terhadap India.

Saat India melakukan *lockdown* pada 2020 karena pandemi Covid-19. Kelompok nasionalis Hindu menuduh virus ini merupakan rencana jahat Muslim India yang dengan sengaja menyebarkan virus dan akhirnya tagar “#CoronaJihad” naik di

aplikasi Twitter. Pada 13-15 Maret, jamaat Tablighi menggelar praktik keagamaan di masjid Nizamuddin Markaz, Delhi. Masjid ini menjadi salah satu tempat dimana banyak kasus muncul dan akhirnya pemerintah India berdasarkan undang-undang penyakit Endemi India, jamaat Tablighi dilaporkan. Nasionalis Hindu dan media pro-pemerintah memanfaatkan hal ini dan membuat narasi yang anti-muslim yang disebarakan melalui berbagai media sosial untuk meningkatkan kebencian, klaim palsu, rumor jahat sehingga meningkatkan kekerasan dan pengucilan komunitas Muslim di India (Amarasingam et al., 2022).

Selain itu, istilah *Love Jihad* kembali muncul. Sejak tahun 1920 pemimpin Hindu khawatir dengan adanya kasta yang lebih rendah (wanita Dalit) ataupun wanita Hindu menikah dengan pria Muslim untuk menghindari stigma kasta. Sehingga mereka menciptakan istilah ini agar memicu konspirasi laki-laki Muslim menjebak perempuan Hindu dalam pernikahan dan menjadikan mereka sebagai Muslim. *Love jihad* memberikan pandangan ancaman yang besar dan membenarkan kekerasan anti-Muslim dan menjadikan laki-laki Muslim sebagai ancaman yang berbahaya. Isu ini kembali naik semenjak organisasi Hindu sayap kanan, *Vishva Hindu Parishad*, menerbitkan daftar kasus dugaan love jihad dan mengatakan bahwa hal ini merupakan perang demografis sehingga polisi harus segera di netralkan oleh pemerintah, polisi dan masyarakat. (Amarasingam et al., 2022).

Di tahun 2021, pada minggu ketiga bulan Oktober 2021, kembali terjadi serangan yang menyasar rumah, toko, dan juga masjid di Tripura. Pelaku dari serangan ini adalah salah satu organisasi Hindutva, *Vishwa Hindu Parishad*. Kejadian ini

merupakan tanggapan atas kekerasan anti-Hindu yang terjadi di Bangladesh karena Puja Pandal di negara tersebut diserang (Daniyal, 2021).

Terdapat rancangan RUU Kependudukan yang dibagikan oleh *Uttar Pradesh State Law Commission* (UPSLC) pada 20221 dimana mereka yang memiliki lebih dari dua anak akan dilarang melamar pekerjaan di pemerintahan, mendapatkan promosi, ataupun mendapat manfaat dari skema kesejahteraan dan subsidi pemerintah. Dibalik niat baiknya untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan yang merata atau membuat jarak kelahiran yang sehat, rancangan ini dinilai anti-Muslim karena menjadi satu-satunya cara untuk mengendalikan populasi Muslim. Anggota BJP Lok Sabha mengatakan perempuan Hindu setidaknya harus melahirkan empat anak untuk melindungi agama Hindu (Article14, 2021).

Januari tahun 2022, dunia sempat dihebohkan dengan pelarangan penggunaan Hijab dalam kelas di salah satu universitas Karnataka, India. Hal ini memunculkan protes dari murid dan orangtua mereka serta muncul anti-protes dari kalangan murid Hindu. Isu ini bermula dari larangan enam mahasiswi yang menggunakan hijab untuk masuk dalam ruang kelas perguruan tinggi di distrik Udipi, Karnataka. Mereka menganggap bahwa hijab bukanlah seragam dari kampus sehingga harus dilepaskan, mereka bisa menggunakan hijab kembali saat diluar kampus. Kemudian, muncul gerakan anti protes dari siswa Hindu yang menggunakan syal Saffron sebagai bentuk protes. Pemerintah akhirnya menutup sekolah menengah atas dan perguruan tinggi karena khawatir akan pecahnya kekerasan antar siswa (BBC, 2022).

Pelarangan penggunaan hijab ini membuat institusi pendidikan yang lain juga melarang penggunaan hijab. Mereka menganggap bahwa hijab bukan menjadi bagian

dari praktik keagamaan yang penting dalam Islam. Karena kurang puasnya siswa dengan putusan pengadilan negara bagian Karnataka, siswa Muslim menggugat putusan pengadilan negara bagian ke Mahkamah Agung pada bulan Maret (Al Jazeera, 2022). Namun, di Mahkamah Agung terdapat dua pendapat yang berbeda. Hakim Hemant Gupta mengatakan bahwa larangan tersebut sudah sesuai dan harus diikuti oleh semua komunitas, sedangkan Hakim Sudhanshu Dhulia mengatakan bahwa pengadilan tinggi mengambil langkah yang salah karena hal tersebut adalah pilihan pribadi, tidak kurang tidak lebih. Seharusnya mereka fokus kepada pendidikan siswa perempuan apakah larangan tersebut membuat hidup lebih baik. Dikhawatirkan dengan larangan ini akan membuat banyak siswa perempuan berhenti bersekolah. Karena putusan tidak membawa hasil, otoritas negara bagian mengatakan bahwa larangan penggunaan hijab tetap berlangsung dan nasionalis Hindu berpendapat bahwa putusan pengadilan negara bagian itu adalah netral terhadap agama dan hanya mempromosikan keseragaman dan disiplin (VOA News, 2022).

Masih banyak kerusuhan komunal yang menyasar kepada Muslim baik tercatat maupun tidak tercatat di negara India. Sehingga jika dapat diringkas secara singkat, berikut adalah kejadian dan kebijakan yang berlangsung selama Narendra Modi dibawah partai BJP berkuasa:

Tabel II: Rangkuman Kekerasan dan Kebijakan sejak Modi Berkuasa

No.	Tahun	Kejadian
1.	2014	Narendra Modi naik menjadi perdana menteri. Ketakutan terhadap Modi naik di masyarakat Muslim. Modi juga tidak disukai di negara Pakistan.
2.	2015	Pada akhir 2014 sampai awal 2015, terdapat serangkaian isu kekerasan komunal yang terjadi di Ambheta, Gujarat India.
3.	2016	Terjadi bentrokan pada saat maulid Nabi di Dhulagarh, mengakibatkan beberapa toko dijarah dan dibakar.
4.	2017	Adanya larangan untuk menyembelih dan memakan daging Sapi.
5.	2018	Terjadi bentrokan antar umat Hindu dan Muslim saat festival Dewa Rama.
6.	2019	Pengesahan CAA untuk para imigran yang datang ke India. namun dalam daftar CAA tersebut, Muslim tidak dimasukkan kedalam daftar.
7.	2020	Muncul istilah Covid Jihad dan Love Jihad.
8.	2021	Adanya aksi balas dendam dari Umat Hindu melakukan vandalisme ke masjid di Tripura setelah Puja Pandal di Bangladesh diserang.
9.	2022	Adanya larangan penggunaan Hijab di negara bagian Karnataka.

(Sumber: Dikelola oleh penulis dari berbagai sumber)

BAB III

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP MUSLIM INDIA TAHUN 2014-2022 MELALUI TRIANGLE VIOLENCE GALTUNG

Semenjak Narendra Modi dibawah partai Bharatiya Janata Party (BJP), kebijakan yang berbau islamophobia dapat dengan mudah diloloskan. Hal ini dikarenakan partai BJP memiliki ideologi *hindutva* yang menjadi dasar politik mereka. Kebijakan-kebijakan ini bermula dengan adanya kekerasan budaya yang menyebabkan kebencian antar umat Hindu dan Muslim. Kebencian ini berlanjut menjadi kekerasan struktural yang dibuat oleh aktor pemerintah. Kebijakan ini akhirnya menjadi alasan munculnya kerusuhan antar agama.

3.1 Cultural Violence

Cultural Violence atau kekerasan budaya berhubungan dengan aspek-aspek kebudayaan dan wilayah simbolis. Hal ini dapat dicontohkan dengan agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu empiris dan formal. Kekerasan budaya seringkali digunakan untuk menjelaskan, membenarkan, maupun melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan budaya yang ada di India dapat dilihat dari 2 aspek, yakni Agama dan Ideologi.

Dalam setiap agama, terdapat sesuatu yang sakral seperti Tuhan. Dengan adanya Tuhan diluar seorang Individu bahkan berada “diatas”, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat orang-orang yang dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan yang lainnya, bahkan orang tersebut dapat terlihat “lebih tinggi” dan dilihat sebagai

kebaikan. Kemudian juga muncul Setan yang menjadi lawan dari kebaikan yaitu kejahatan. Tuhan akan memilih orang-orang yang memiliki kemiripan dengan-Nya dan disebut sebagai “orang terpilih”. Selain adanya Tuhan, dibutuhkan penerus agama dalam bentuk ideologi politik. Pada saat inilah kekerasan struktural dimulai. Orang-orang akan dieksploitasi karena terlihat rendah dan tidak manusiawi sehingga akhirnya merampas kemanusiaan mereka dan akhirnya akan memunculkan kekerasan langsung dimana korban akan disalahkan (Galtung, 1990).

Kemenangan partai BJP pada tahun 2014 dan tahun 2019 tidak terlepas dengan adanya campur tangan agama dan ideologi. Pada tahun 2014 terdapat beberapa alasan mengapa BJP dapat memenangkan pemilihan umum. Yaitu karena BJP mampu dalam menarik perhatian masyarakat di pedesaan dan dapat menarik masyarakat yang sebelumnya tidak melakukan pemilihan, mereka juga dapat meraih suara di tempat-tempat dimana partai BJP lemah pada pemilu sebelumnya. Dengan kemampuan Narendra Modi dalam berbicara, Ia mampu menarik masyarakat pedesaan yang digambarkan sebagai ‘kelas menengah baru’ India sebagai bentuk dari urbanisasi dan mengakui bahwa aspirasi mereka mengacu pada visi rurban (membawa fasilitas gaya perkotaan ke pedesaan). Meskipun demikian, BJP juga tidak melupakan masyarakat di perkotaan karena mereka juga memiliki bagian penting di kemenangan pemilu tahun 2014, yaitu rata-rata margin kemenangan yang lebih besar dibandingkan pedesaan. Selain itu, Modi dapat mengungguli kampanye yang ada pada saat itu karena Ia membawa tema-tema seperti korupsi dan kasta yang erat kaitannya di masyarakat, kemudian BJP juga menggunakan pengalaman Modi sebagai menteri utama di Gujarat sebagai salah satu kampanye. Namun, faktor utama dalam kemenangan ini adalah Modi

mampu mendorong orang-orang yang sebelumnya tidak memilih dapat untuk memilih dirinya daripada menggantungkan suara kepada *swing voters* (Tillin, 2015).

Partai BJP kembali memenangkan pemilu pada tahun 2019. Karena BJP memiliki citra yang baik di masyarakat kalangan bawah sehingga mereka dapat melepaskan label sebagai partai kasta atas. BJP juga memiliki citra sebagai partai yang oposisi dan ikut dalam politik perbedaan minoritas seperti Muslim. Namun, BJP membantah hal tersebut karena mereka memegang *Na triskarit kareng* *na puraskrit kareng*, *na bahiskrit kareng* yang berarti mereka tidak akan membenci, atau menghargai, atau mengucilkan. Hal ini berarti BJP mengatakan bahwa mereka tidak ada membedakan masyarakat di India. sehingga, pemilu tahun ini BJP dapat mengungguli saingan mereka dengan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, popularitas Narendra Modi dan posisi ideologi BJP mendapatkan keunggulan besar. Mereka mampu dalam menggerakkan masyarakat untuk memilih mereka. Kampanye mereka di media sosial juga membuat mereka mampu untuk menjangkau lebih banyak pemilih. Modi juga mampu membawa tingkat kepercayaan masyarakat menjadi tinggi kepadanya. Kemudian, BJP memiliki keunggulan dibandingkan partai lainnya seperti kendali narasi media dan pendanaan. BJP juga hadir negara bagian yang lemah secara elektoral, terutama di timur dan timur laut India. Pada pemilu tahun 2019, BJP juga membawa keamanan nasional dimana masyarakat menganggap bahwa BJP mampu menangani masalah keamanan nasional. Hal ini didasari karena BJP pernah menangani kasus serupa seperti konflik dengan Pakistan. Kemudian pemerintah *National Democratic Alliance* (NDA) atau aliansi politik yang dipimpin oleh BJP mengeluarkan kebijakan yang menjadi solusi yang

sedang dihadapi dan membantu mengatasi ketidaknyamanan kehidupan sehari-hari masyarakat India. (Chhibber & Verma, 2019).

Meskipun demikian, terdapat sentimen lain yang menjadi alasan mengapa partai BJP dapat memenangkan pemilu di India. Yaitu mereka menggunakan ideologi Hindutva untuk menarik perhatian masyarakat Hindu khususnya masyarakat sayap kanan. Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, BJP menggunakan nasionalisme demi meraih dukungan masyarakat untuk mendapatkan suara bagi kebijakan sayap kanan dan menyatukan pandangan mengenai masyarakat minoritas (Engage, 2019). Umat Hindu menjadi salah satu kelompok agama yang mendukung BJP, hampir setengah dari pemilih Hindu (49%) mendukung partai BJP sehingga partai ini dapat menduduki mayoritas di Lok Sabha dan membuat Narendra Modi dapat kembali menjabat sebagai perdana menteri India. Dukungan yang diterima oleh partai BJP ini berasal dari berbagai daerah di India. Suara tertingginya berasal dari daerah Utara dengan 68% suara dan Tengah dengan 65% suara (Evans, 2021). Eratnya BJP dengan ideologi Hindutva ini membuat partai ini sukses meraih kemenangan pemilu. Namun dibalik itu, politisasi agama hindu pada partai BJP membuat masyarakat umat Muslim di India merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas kedua akibat dari kebijakan yang dikeluarkan sangat agresif dan diskriminatif (Krishnan, 2022).

Perwakilan masyarakat Muslim yang ada di pemerintahan India sangat minim. Hal ini menyebabkan suara-suara dari masyarakat Muslim India tidak bisa didengar dan dikabulkan oleh pemerintahan. Juli 2022, Mukhtar Abbas Naqvi mengundurkan diri dari kabinet perdana menteri India, Narendra Modi dan partai BJP sehingga saat ini kabinet Modi tidak memiliki satu orang pun yang beragama Islam. Hal ini juga

berarti BJP tidak memiliki anggota Muslim pada parlemen nasional yang memiliki 395 anggota. Pengunduran diri ini membuat masyarakat muslim menjadi khawatir dan merasa dipinggirkan oleh pemerintahan India (REHBAR, 2022).

Dengan pengunduran Abbas, representasi umat muslim di parlemen India menjadi menurun dimana setelah pemilu pada tahun 2019, umat Muslim menduduki 5 persen dari parlemen, namun pada 2022 dengan pengunduran diri tersebut membuat representasi umat muslim menjadi nol. Dengan terpinggirkannya masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari di India, mereka menjadi kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Diskriminasi yang mereka dapatkan dapat terlihat dari sektor pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Mereka juga sulit untuk mencapai kekuatan politik dan kekayaan serta sulit untuk mendapatkan perlindungan secara konstitusional (Campbell et al., 2022).

Diskriminasi pekerjaan terhadap masyarakat Muslim di India juga terlihat dari sulitnya masyarakat Muslim di India mendapatkan gaji yang setimpal. Masyarakat muslim mengalami peningkatan pengangguran mencapai 17% saat Pandemi Covid-19 dibandingkan dengan masyarakat non-Muslim. Menjadikan pengangguran Muslim di pedesaan menjadi 31,4%. Sedangkan populasi masyarakat muslim di perkotaan yang berusia lima belas tahun keatas hanya mencapai 15,6% yang memiliki pekerjaan dengan gaji tetap. Jika dibandingkan dengan diskriminasi pada tahun 2004-2005 dimana angka diskriminasi terhadap umat muslim mencapai 59,3 persen, terjadi kenaikan sebesar 9% pada tahun 2019-2020 dimana angka diskriminasi terhadap Muslim mencapai 68,3 persen (Anadolu Ajansi, 2022).

Negara India yang seharusnya menjadi negara yang multikultural, dan memiliki

bahasa, agama, ras, dan budaya yang beragam seperti keinginan pada pendirinya yang ingin membuat India menjadi negara yang sekuler. Namun, karena kemenangan BJP dan Narendra Modi pada pemilu tahun 2014 membuat ideologi Hindutva mendapatkan momentum yang baik sehingga ideologi ini menjadi semakin kuat di India. Savarkar sebagai orang yang memperkenalkan pertama kali konsep Hindutva mengatakan bahwa Hindutva bisa digunakan sebagai salah satu cara dalam mengidentifikasi “*self*” dan “*others*”. Dalam pamfletnya “*Hindutva, Who is a Hindu*”, Savarkar mendefinisikan seorang Hindu memiliki komponen teritorial, politik, nasionalistik dan leluhur. Sehingga, Hindu dalam pandangan Savarkar perlu memenuhi beberapa kondisi, yaitu:

- a. Lahir di dalam Hindu dan memiliki klaim yang sah atas tanah air mereka (*Pitrabhoo*)
- b. Mewarisi darah hindu dari orang tua kandung (*Pati*)
- c. Menjadi bagian dari kebudayaan bersama (*Sanskriti*)

Konsep ini membuat Muslim, Kristen Yahudi, Parsi dikesampingkan dan dilihat sebagai *others* dimana keberadaannya akan mengancam, khususnya Muslim. Ideologi Hindutva ini menjadi kekuatan politik yang dipegang sejak awal oleh partai BJP dan merupakan alat politik dalam perlawanan dominasi di era pasca-pemisahan. Ideologi ini merupakan upaya untuk membentuk identitas Hindu menjadi satu dan memperkuat posisi kekuatan politik mereka. Oleh karena itulah dibawah kepemimpinan Modi, BJP saat ini berusaha untuk mengkonsolidasikan homogenisasi dengan membangun identitas hegemonik Hindu di India (Babur & Akhtar, 2021).

Kekerasan ini masuk dalam kategori kekerasan budaya karena adanya aspek kebudayaan khususnya agama dan ideologi yang berperan penting dalam isu-isu ini.

Kebencian umat agama Hindu terhadap Muslim menjadi bahan politik bagi partai BJP untuk mendapatkan suara. Mereka menggunakan *hindutva* sebagai ideologi partai politiknya agar dapat menarik perhatian masyarakat umat Hindu yang juga merupakan mayoritas penduduk di India agar dapat menang di pemerintahan. Kekerasan budaya di India juga masuk dalam kategori *invisible violence* atau kekerasan tidak terlihat karena tidak dapat diukur. Kekerasan budaya inilah yang menjadi alasan terciptanya kekerasan struktural dan mengakibatkan kekerasan langsung.

3.2 Structural Violence

Kekerasan struktural atau *Structural Violence* merupakan kekerasan yang terjadi secara sistematis yang disebabkan oleh aktor yang biasanya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lain, contohnya pemerintahan sebuah negara. Otoritas yang lebih tinggi dapat melakukan kekerasan jenis ini karena mereka dapat melakukan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan berakibat munculnya ketidaksetaraan di masyarakat. Kekerasan ini membuat kemampuan masyarakat menurun dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dampak dari kekerasan ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya mereka dari kalangan bawah dan kelompok marginal. Kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat dapat terlihat baik dari segi fisik maupun mental atau psikologis. Dalam jurnalnya, Galtung memperlihatkan contoh dari kekerasan pribadi dan kekerasan struktural. Saat seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, maka kekerasan tersebut merupakan kekerasan personal. Sedangkan, hal tersebut menjadi kekerasan struktural ketika satu juta suami melakukan kekerasan terhadap istri mereka. Dalam masyarakat, harapan hidup dua kali lebih tinggi di kelas

atas dibandingkan kelas bawah. Dan kekerasan struktural sering kali disebut sebagai ketidakadilan sosial, hal ini disebabkan agar definisinya menjadi lebih positif dibandingkan dengan sebutan kekerasan struktural. Dengan demikian, perdamaian dapat didefinisikan sebagai tidak adanya kekerasan struktural (Galtung, 1969)

Galtung juga menjelaskan berbagai macam tipologi kekerasan struktural. Ia menjelaskan bahwa eksploitasi A (dirugikan sehingga mereka meninggal) adalah kekerasan terhadap kebutuhan hidup. Eksploitasi B (dirugikan dan dibiarkan dalam keadaan sengsara) adalah kekerasan terhadap kebutuhan kesejahteraan. Penetrasi dan segmentasi adalah kekerasan terhadap kebutuhan identitas. Sedangkan marginalisasi dan fragmentasi adalah kekerasan terhadap kebutuhan kebebasan (Galtung, 1990).

Banyak kebijakan yang diloloskan oleh partai BJP yang memiliki unsur islamophobia. Perlindungan mengenai hewan ternak atau tidak diperbolehkannya penyembelihan sapi dan mengkriminalkan orang yang menjual daging sapi telah diadopsi ke 24 dari 29 negara bagian yang dipimpin oleh partai BJP. Undang-undang ini membuat banyak terjadinya kekerasan terhadap Muslim dan adanya aksi main hakim sendiri dari umat Hindu dan polisi setempat. Kemudian adanya larangan untuk konversi atau pindah agama dari pemerintah India. Larangan ini telah diberlakukan di 7 dari 29 negara bagian yang mana bertolak belakang dengan perlindungan kebebasan beragama. Larangan ini berfungsi agar pemerintah dapat mengkriminalisasikan kaum-kaum minoritas dan kasta rendah untuk pindah agama dengan dalih mencegah paksaan dan bujukan. Sejalan dengan itu, pemerintah telah memberlakukan aturan dalam pernikahan masyarakatnya agar tidak terjadi konversi agama dalam pernikahan. Sehingga, negara bisa tidak mengizinkan pernikahan jika salah satu pihak, khususnya

wanita Hindu akan berpindah agama. Ide dari larangan ini adalah dengan menyebarkan narasi-narasi yang membuat laki-laki Muslim terlihat jahat, memaksa pernikahan kepada wanita Hindu, dan mengancam agama Hindu. Mereka menyebarkan tagar #LoveJihad sebagai alat dalam menyebarkan kekhawatiran umat Hindu terhadap isu ini. (Hassan, 2020).

Serta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, India masih dihebohkan dengan dua kebijakan yang sempat diloloskan oleh pemerintahan dibawah kepemimpinan Modi dan partai BJP. Terjadi protes pada tahun 2020 oleh masyarakat Muslim karena memprotes Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang dinilai anti-Islam. Dalam amandemen tersebut berisi bahwa imigran Hindu, Budha, Sikh, Kristen dari tiga negara tetangga, yakni Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan bisa menjadi warga negara India dengan regulasi yang telah dipermudah. Namun hal tersebut diprotes oleh umat Muslim karena didalam Amandemen tersebut tidak dicantumkan kelompok Muslim dan ketiga negara tersebut memiliki mayoritas masyarakat beragama Islam sehingga sudah seharusnya mereka juga mendapatkan keringanan dan tidak menjadi imigran ilegal di India. Protes yang dikeluarkan oleh umat Muslim ini ditentang oleh masyarakat Hindu dan mereka melakukan kerusakan ke masjid bahkan rumah – rumah masyarakat muslim India. Beberapa orang juga mengatakan bahwa pihak kepolisian India membantu masyarakat Hindu dalam melakukan penyerangan ini (Wirayuda, 2020). Sedangkan pada awal tahun lalu, India mendapatkan protes dari siswa Muslim khususnya negara bagian Karnataka karena adanya larangan penggunaan hijab di kelas karena tidak sesuai dengan aturan berpakaian di kampus. Para siswa Muslim ini akhirnya mengisi petisi mengenai pelarangan ini ke Pengadilan Tinggi Karnataka.

Pelarangan ini akhirnya melahirkan kontroversi di Karnataka mengenai sifat otonomi individu, kebebasan beragama, dan pertanyaan mengenai India yang berkeinginan menjadi negara sekuler (Rahman & Sebastian, 2022).

Selain itu, Muslim juga berada pada bagian masyarakat India yang paling tidak berpendidikan. Hal ini disebabkan karena ukuran keluarga yang besar, tidak adanya sekolah yang tersedia, kurangnya hubungan antara pendidikan madrasah dan pendidikan modern, tidak memiliki finansial yang cukup, serta sikap negatif terhadap pendidikan anak perempuan. Kurangnya pendidikan di antara masyarakat Muslim India membuat mereka menjadi buta huruf, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, pendapatan mereka rendah. Hal ini membuat masyarakat Muslim India sulit keluar dari garis kemiskinan. Tingkat putus sekolah anak-anak Muslim India juga meningkat setelah sekolah menengah. Mereka lebih memilih untuk bekerja dan membantu menghidupi keluarga mereka dibandingkan belajar di sekolah (Shazli & Asma, 2015).

Perempuan Muslim merupakan kelompok yang paling terdampak dari kurangnya sistem pendidikan di India. Partisipasi perempuan muslim masih sangat jauh dalam sektor pekerjaan yang layak. Partisipasi perempuan muslim dalam pekerjaan kurang dari 15% jika dibandingkan dengan perempuan non muslim yang mencapai lebih dari 27%. Hal ini juga diperburuk dengan naiknya Modi dan partai BJP pada 2014 dimana Ia mengeluarkan kebijakan yang menargetkan Muslim dan hak-hak ekonomi dan agama Muslim. Belum lagi dengan adanya tujuan Hindu yang ingin melumpuhkan Muslim secara ekonomi dan memaksa mereka dalam keadaan yang menyedihkan atau sengsara agar Muslim dapat menjadi kelompok yang ditaklukan secara permanen (Amin, 2022).

Muslim sering kali tidak mendapatkan tawaran pekerjaan maupun tawaran promosi. Kebanyakan hal ini dikarenakan mereka seorang Muslim. Pada tahun 2015, Zeeshan Khan pernah mencoba untuk melamar pekerjaan di salah satu perusahaan perhiasan. Namun, ia gagal untuk mencapai tahap wawancara. Ia mendapatkan *e-mail* dari perusahaan tersebut yang mengatakan bahwa mereka tidak hanya mempekerjakan kandidat non-Muslim. Beberapa orang berpendapat bahwa suasana negara di India telah berubah semenjak BJP berkuasa (BBC, 2015). Namun, perlu diketahui bahwa hal ini juga terjadi pada agama yang lain. Khan mengatakan bahwa pada saat ia mencari pekerjaan di internet, ia mendapatkan iklan-iklan yang hanya ingin menerima pelamar dari salah satu agama, seperti pelamar Muslim atau Kristen. Dan juga, beberapa Muslim yang memiliki otoritas mengatakan bahwa tidak semua perusahaan melakukan diskriminasi seperti ini (Business Standard, 2015).

Berdasarkan *Centre for Monitoring Indian Economy*, tingkat pengangguran yang dihadapi oleh masyarakat Muslim mencapai 5,3%, lebih tinggi dibandingkan Hindu dengan 4,5% pada tahun 2017-2018. Angka ini naik menjadi 8,5% pada tahun 2021-2022. Hal ini menandakan bahwa Muslim memiliki tingkat pekerjaan yang rendah. Pada tahun 2021-2022, hanya 34,7 persen masyarakat muslim yang dipekerjakan. Pekerjaan yang didapat pun kadang tidak layak dengan upah yang kecil (Vyas, 2022).

31 persen Muslim India hidup dalam kemiskinan dan hanya 8,5 persen yang bekerja di pemerintahan. Namun karena adanya kampanye yang dibawa Modi dan BJP yakni "*Make in India*" dimana kampanye ini bergerak di bidang ekonomi dan politik, membuat pemerintah India tidak mengakui kontribusi ekonomi yang diberikan oleh

penduduk Muslim. Bahkan, pemerintah tidak mengakui keberadaan masyarakat Muslim (East Asia Forum, 2022). Padahal, seharusnya BJP mampu untuk membuat kebijakan yang dapat memasukkan seluruh warganya termasuk Muslim. Jika tidak, maka akan terbentuk jarak di antara masyarakat India.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti di atas menegaskan bahwa umat Muslim di India mendapatkan diskriminasi struktural dari pemerintah India. Mereka tidak mendapatkan perwakilan dalam politik dan ekonomi, susah akses dalam mendapatkan berbagai peluang seperti pekerjaan, susah akses ke sektor kesehatan, mendapatkan diskriminasi dari sektor pendidikan serta kesulitan mendapatkan rasa aman yang sejatinya merupakan sebuah hak dasar. Bahkan, dapat dikatakan bahwa fasilitas yang mereka dapatkan di negara India jauh di bawah standar (Hassan, 2020). Bahkan dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut seolah-olah membawa stigma negatif bahwa masyarakat umat Muslim itu adalah sebuah ancaman, harus dikendalikan populasinya, dan harus diberantas.

Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh partai BJP memenuhi kriteria pada tipologi yang dibuat oleh Galtung, beberapa contoh diantaranya adalah adanya represi atau penindasan terhadap masyarakat Muslim di India. Penahanan, pengusiran, dan juga pengucilan juga dirasakan oleh masyarakat Muslim India. Kemudian, orang-orang yang sejatinya tidak memiliki kesempatan mendapatkan kerugian sehingga mereka bisa meninggal karena kelaparan atau terbuang karena penyakit (termasuk dalam kategori Eksploitasi A). Serta, karena tidak adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada dan tetap mengeluarkan peraturan maupun kebijakan yang diskriminatif dan merampas hak-hak masyarakat

Muslim sebagai warga negara sehingga kehidupan masyarakat Muslim India menjadi sengsara secara permanen (termasuk dalam kategori eksploitasi B) seperti malnutrisi dan penyakit. Akibatnya pula, masyarakat di India terbagi menjadi beberapa bagian (segmentasi). Kebijakan ini juga merupakan kekerasan yang tidak terlihat karena dampak dari kebijakan ini tidak dapat diukur. Tidak ada alat ukur pasti yang dapat mengukur kekerasan ini. Seberapa dalamnya “sakit” yang diterima masyarakat muslim akibat kebijakan anti-Muslim yang dengan mudah diloloskan.

3.3 Direct Violence

Direct Violence atau kekerasan langsung adalah jenis kekerasan yang realisasinya tidak ditahan. Namun langsung dimusnahkan. Dalam jurnalnya, Galtung menyebutkan contoh bahwa ketika terjadinya perang, akan terjadi kekerasan langsung karena membunuh atau menyakiti seseorang merupakan realisasi yang tidak dapat ditahan dan terpampang nyata. Contoh lain dari kekerasan langsung adalah pemukulan, perampasan kesehatan, perang, bahkan yang paling ekstrim adalah pembunuhan (Galtung, 1969). Sehingga biasanya kekerasan langsung dilakukan secara fisik serta dapat diukur dari jumlah kematian ataupun kerugian materiil pada kasus tersebut.

Dalam tipologi kekerasan oleh Galtung, ia menjelaskan bahwa pembunuhan termasuk dalam kekerasan terhadap kebutuhan untuk bertahan hidup. melukai , pengepungan, sanksi, dan penderitaan termasuk dalam kekerasan terhadap kebutuhan kesejahteraan. Desosialisasi, resosialisasi, dan warga negara sekunder kekerasan terhadap kebutuhan identitas. Penahanan, represi, dan pengusiran adalah kekerasan terhadap kebutuhan kebebasan (Galtung, 1990).

Masyarakat Muslim di India sejatinya khawatir dengan naiknya Modi menjadi perdana menteri India. Hal ini berasal dari isu adanya campur tangan Modi pada kerusuhan Gujarat pada tahun 2002 lalu (Reuters, 2014). Tahun 2015 sempat terjadi pembersihan etnis dimana satu keluarga di desa Katpor didatangi oleh sekelompok umat agama Hindu dan dipaksa memilih antara masuk dalam agama Hindu atau meninggalkan desa tempat tinggal mereka. Sekelompok umat Hindu tersebut juga melakukan pengambilalihan masjid di daerah tersebut (Chauhan, 2015).

Pada festival keagamaan seperti pada tahun 2016 dan 2018 menjadi bukti adanya kekerasan langsung di negara India. Perubahan rute festival Maulid Nabi di Dhulagarh memicu adanya komentar negatif dari umat Hindu dan menjadi pecahnya kekerasan antar umat. Akibatnya banyak toko-toko umat Muslim yang hartanya diambil dan dibakar (Newslaundry, 2016). Sedangkan pada festival keagamaan Dewa Rama tahun 2018 bentrokan antar umat ini sampai membuat empat orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka (Kuwait Times, 2018).

Larangan penyembelihan sapi juga mewarnai aksi kekerasan pada tahun 2016 akhir sampai 2017. Dengan naiknya Modi, banyak muncul kelompok dan organisasi nasionalis Hindu yang menyerang praktik Muslim dan Dalit yang melakukan penyembelihan sapi. Mereka berani melakukan penyerangan ini karena mereka menganggap bahwa mereka telah dilindungi oleh hukum negara tepatnya pasal 48 konstitusi India dan kegiatan mereka ini merupakan tindakan yang terpuji karena sapi merupakan hewan suci di agama Hindu (Ahuja, 2019).

Dengan adanya kekerasan-kekerasan maupun bentrokan yang terjadi di tiap tahun semenjak BJP berkuasa di India. Maka tipologi kekerasan galtung yang

disebutkan di awal terpenuhi. Bentrokan-bentrokan tersebut termasuk dalam kekerasan terhadap kesejahteraan dimana banyak umat muslim yang menderita dan terluka. Umat muslim yang merasa dirinya menjadi warga negara sekunder juga menjadi bukti bahwa pemerintah merampas kebutuhan identitas mereka. Adanya pengusiran terhadap masyarakat Muslim merupakan kekerasan terhadap kebutuhan kebebasan mereka. Bahkan kebutuhan untuk bertahan hidup umat Muslim india juga tidak terpenuhi dengan banyaknya kasus pembunuhan. Bentuk kekerasan ini juga masuk kedalam bentuk kekerasan yang terlihat, hal ini dikarenakan bentuk dari kekerasan ini dapat terlihat dari adanya luka-luka pada korban ataupun korban jiwa akibat pecahnya bentrokan antar umat. Toko-toko yang dijarah dan dibakar oleh massa juga menjadi bukti yang kuat mengapa kekerasan ini masuk dalam kategori kekerasan yang terlihat.

Dengan adanya *cultural violence* dan *structural violence*, mengakibatkan terbentuknya *direct violence*. Galtung sendiri mengatakan bahwa direct violence atau kekerasan langsung merupakan dapat terjadi karena adanya kedua hal ini. Pada kasus kekerasan komunal di India, khususnya pada kasus komunal yang menyasar kepada masyarakat muslim di India berawal dari adanya kekerasan budaya dan kekerasan struktural. Adanya kebencian terhadap agama Islam dan peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh partai BJP di bawah naungan Modi menjadi bahan bakar kemarahan masyarakat Hindu India. Sehingga perpecahan di tengah masyarakat tidak bisa dihindari.

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Kekerasan menurut Galtung dapat dimulai pada setiap sudut pada konsep segitiga kekerasan. Baik dari kekerasan langsung, kekerasan struktural, maupun kekerasan budaya yang dapat dengan cepat menyebar ke sudut yang lainnya. Dengan kekerasan struktural yang dilembagakan dan kekerasan budaya yang terinternalisasi atau dipercaya masyarakat, menjadikan kekerasan langsung juga cenderung menjadi terinstitusi, berulang-ulang, ritualistik, dan seperti balas dendam. Inilah yang terjadi di negara India dimana kekerasan budaya yang telah mengakar dengan cepat menyebar ke sudut yang lain yakni kekerasan struktural dan kekerasan langsung.

Sebagai negara yang mengakui bahwa mereka adalah negara yang sekuler, sudah seharusnya negara India mampu untuk memberikan toleransi kepada setiap warga negaranya tanpa melihat latar belakang masyarakat tersebut, apalagi dari segi agama. Namun, India gagal dalam memperlihatkan hal tersebut karena adanya kebijakan - kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bharatiya Janata Party (BJP) dibawah kepemimpinan Narendra Modi menjadi bukti bahwa pemerintah India sebagai aktor yang memberikan kekerasan secara struktural kepada masyarakat Muslim India.

Ideologi Hindutva yang BJP pegang sejatinya bisa menjadi positif ketika masyarakat India merasa memiliki kebebasan beragama dan memiliki nilai toleransi dan menghormati semua agama. Namun, orang India tetap ingin mempertahankan pemisahan agama. Sehingga mereka akan melakukan segala cara agar penggabungan

budaya tidak terjadi, seperti tidak memperbolehkan pernikahan antar agama atau antar kasta. kedua hal ini yang sebelumnya dianggap akan mewujudkan persatuan dan keharmonisan antar kelompok masyarakat sekarang menjadi ancaman bagi masyarakat India.

Dengan adanya sentimen anti-minoritas yang sistematis akibat ideologi partai BJP yakni Hindutva, kesenjangan berbagai kelompok agama menjadi semakin luas dan dalam sehingga sulit untuk diperbaiki. Tercipta pola pikir yang teratur dalam masyarakat yang sudah terfragmentasi. Kekerasan komunal yang terjadi di India merupakan masalah nasional yang serius, Hindutva menjadikan kebencian dan kekerasan komunal sebagai 'senjata pemusnah massal minoritas'. Dalam hal ini Narendra Modi dan partai BJP telah berhasil menjadikan praktik keagamaan khususnya muslim bertentangan dengan negara India dan memutus aksesibilitas masyarakat muslim dengan hak mereka sebagai warga negara. Dapat terlihat dari data bahwa selama partai BJP berkuasa, kehidupan masyarakat Muslim di India tidak membaik.

Dampaknya, masyarakat muslim jadi menderita, tidak mendapatkan dapat hak yang setara seperti masyarakat lainnya, hak-haknya dirampas, dll. Hal ini juga menjadi kontradiktif atau bertolak belakang dengan janji-janji yang disampaikan oleh Narendra Modi pada pidatonya saat ia mencalonkan diri menjadi menteri India.

Jika dilihat dari perspektif segitiga kekerasan oleh Johan Galtung, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah India di bawah partai BJP dan Modi berasal dari kekerasan budaya yang telah mengakar di India. Sehingga kekerasan tersebut dianggap normal untuk dilakukan. Hindutva sebagai ideologi yang dianut oleh partai BJP menjadi alasan mengapa partai BJP mengeluarkan kebijakan-kebijakan

yang berbau Islamophobia dan lebih mengutamakan umat Hindu dalam memutuskan sebuah kebijakan atau peraturan. Dampak dari kekerasan ini adalah muncul kekerasan-kekerasan secara fisik. Seperti: pemberontakan, kekerasan fisik, pelecehan, bahkan pembunuhan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, tentunya penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Dengan adanya saran dan rekomendasi, penulis berharap akan dapat membantu penelitian selanjutnya untuk mempermudah dalam melakukan analisis serupa. Beberapa rekomendasi dari penulis yaitu:

1. Karena aktor yang penulis analisis pada penelitian ini adalah partai Bharatiya Janata Party atau BJP, akan menarik jika penelitian selanjutnya membahas mengenai kebijakan atau respons dari partai oposisi yaitu Indian National Congress atau Partai Kongres Nasional India dalam hal kebijakan Islamophobia di India

2. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep segitiga kekerasan oleh Johan Galtung, dimana konsep ini sudah sangat lama. Sehingga, akan sangat menarik jika penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori maupun konsep yang lebih baru / modern dalam menganalisis alasan mengapa pemerintah India mengeluarkan kebijakan Islamophobia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahuja, J. (2019). Protecting holy cows: Hindu vigilantism against Muslims in India. *Vigilantism against migrants and minorities*, 55-68.

Al Jazeera. (2018, March 30). *Four Indians killed in communal clashes at Hindu festival*. Al Jazeera. Retrieved June 3, 2023, from <https://www.aljazeera.com/news/2018/3/30/four-indians-killed-in-communal-clashes-at-hindu-festival>

Al Jazeera. (2022, October 13). *India's Supreme Court panel split on allowing hijab in classrooms* / *Courts News*. Al Jazeera. Retrieved June 3, 2023, from <https://www.aljazeera.com/news/2022/10/13/indias-supreme-court-panel-split-on-allowing-hijab-in-classrooms>

Amarasingam, A., Umar, S., & Desai, S. (2022). "Fight, Die, and If Required Kill": Hindu Nationalism, Misinformation, and Islamophobia in India. *Religions*, 13(5), 380.

Amin, Z. (2022, August 3). *Muslim women in India allege bias in hiring for jobs*. Al Jazeera. Retrieved June 21, 2023, from <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/3/muslim-women-in-india-allege-bias-in-hiring-for-jobs>

Anadolu Ajansi. (2022, September 15). *Job discrimination against Indian Muslims rises by 9% in 16 years: Report*. Anadolu Agency. Retrieved June

20, 2023, from <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/job-discrimination-against-indian-muslims-rises-by-9-in-16-years-report/2686269>

Ansari, K. (2016). Hindu Nationalism in Theory and Practice. *Cultural Anthropology*, 34-36.

Article14. (2021, September 8). *Behind The BJP's 2-Child Policies, An Anti-Muslim Agenda That Will Endanger All Indian Women — Article 14*. Article 14. Retrieved June 3, 2023, from <https://article-14.com/post/behind-the-bjp-s-2-child-policies-an-anti-muslim-agenda-that-will-endanger-all-indian-women-613823097d3c5>

Ashraf, M. T. (2018). The Antecedents of Pakistan-India Conflict: Challenges and Prospects for Solution. *Journal of Pakistan Vision*, 19(2), 19-20.

Babur, A., & Akhtar, S. (2021). Hindutva and Islamophobia. *Strategic Studies*, 41(4), 1-16.

BBC. (2015, May 22). *Indian man denied job for 'being Muslim'*. BBC. Retrieved June 21, 2023, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-32840862>

BBC. (2022, October 13). *Hijab verdict: India Supreme Court split on headscarf ban in classrooms*. BBC. Retrieved June 3, 2023, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-63225351>

Bharatiya Janata Party. (n.d.). *History of the party | Bharatiya Janata Party*. BJP.org. Retrieved February 14, 2023, from <https://www.bjp.org/historyoftheparty>

Bharatiya Janata Party. (n.d.). *Our Philosophy / Bharatiya Janata Party*. BJP.org. Retrieved February 14, 2023, from <https://www.bjp.org/philosophy>

Business Standard. (2015, June 5). *Minority report: Hiring Muslims in India Inc*. Business Standard. Retrieved June 21, 2023, from https://www.business-standard.com/article/beyond-business/minority-report-115060501162_1.html

Campbell, H., Raushenbush, P. B., Maizland, L., & Ayres, A. (2022, July 14). *India's Muslims: An Increasingly Marginalized Population*. Council on Foreign Relations. Retrieved June 20, 2023, from <https://www.cfr.org/backgrounder/india-muslims-marginalized-population-bjp-modi>

Chauhan, A. (2015, March 10). *Fact Finding Report On Communal Violence in Bharuch District, Gujarat / SabrangIndia*. Sabrang India. Retrieved June 2, 2023, from <https://sabrangindia.in/indepth/fact-finding-report-communal-violence-bharuch-district-gujarat>

Chhibber, P., & Verma, R. (2019). The rise of the second dominant party system in India: BJP's new social coalition in 2019. *Studies in Indian Politics*, 7(2), 131-148.

CIA. (n.d.). *India - The World Factbook*. CIA. Retrieved April 20, 2022, from <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/india/>

Daniyal, S. (2021, November 3). *Tripura anti-Muslim riots demonstrate how Indian and Bangladeshi extremists feed off each other*. Scroll.in. Retrieved June 3, 2023, from <https://scroll.in/article/1009477/tripura-anti-muslim-riots-demonstrate-how-indian-and-bangladeshi-extremists-feed-off-each-other>

Deccan Herald. (2019, September 17). *PM Modi turns 69: A timeline of his political career*. web.archive.org.

<https://web.archive.org/web/20210115073300/https://www.deccanherald.com/national/pm-modi-turns-69-a-timeline-of-his-political-career-761937.html>

Deutsche Welle. (2022, March 18). *Akankah Larangan Jilbab India Digunakan untuk Pembatasan yang Lebih Luas bagi Umat Muslim?* DW.

Retrieved April 20, 2022, from <https://www.dw.com/id/lika-liku-larangan-penggunaan-jilbab-di-india/a-61168985>

East Asia Forum. (2022, January 17). *'Make in India's' Muslim marginalisation*. East Asia Forum. Retrieved June 21, 2023, from <https://www.eastasiaforum.org/2022/01/17/make-in-indias-muslim-marginalisation/>

Engage. (2019, May 6). *How the BJP Promotes Hindutva through a Nationalist Agenda*. Economic and Political Weekly |. Retrieved June 1, 2023, from <https://www.epw.in/engage/article/how-bjp-promotes-hindutva-through-nationalist>

Evans, J. (2021, August 5). *In India, Hindu support for Modi's party varies by region and is tied to beliefs about diet and language*. Pew Research Center. Retrieved June 1, 2023, from <https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/08/05/in-india-hindu-support-for-modis-party-varies-by-region-and-is-tied-to-beliefs-about-diet-and-language/>

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 35-54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of peace research*, 6(3), 167-191.
- Galtung, J. (1990). Cultural violence. *Journal of peace research*, 27(3), 291-305.
- Galtung, J. (2004). Violence, war, and their impact. On visible and invisible effects of violence. *Polylog*, 5.
- Hassan, S. (2020). Citizens Against Hate – India. 1-9.
- Hindutvawatch. (n.d.). *Sangh Parivar*. Hindutva Watch. Retrieved June 20, 2023, from <https://hindutvawatch.org/sangh-parivar/>
- Hussain, S., Usman, A., Habiba, U., Amjad, A., & Amjad, U. (2019). Hate crimes against muslims and increasing islamophobia in india. *Journal of Indian Studies*, 5(1), 7-15.
- Introduction to the Second Edition. (2012). In A. Shaban (Ed.), *Lives of Muslims in India* (pp. xix - xxx). Avantika Printers Private Limited.
- Krishnan, M. (2022, February 18). *India: Is 'Hindutva' a civilizational principle?* – DW – 02/18/2022. DW. Retrieved June 1, 2023, from <https://www.dw.com/en/india-is-the-ruling-bjps-hindutva-approach-a-civilizational-principle/a-60835665>
- Kundu, I. (2016, December 28). *Rather than protecting, Bengal police gave us 2 minutes to flee our own homes: Dhulagarh riot victims tell India Today*.

India Today. Retrieved June 2, 2023, from

<https://www.indiatoday.in/india/story/dhulagarh-riots-howrah-kolkata-mamata-banerjee-milad-ul-nabi-359866-2016-12-28>

Kuwait Times. (2018, March 27). *Trouble at Hindu festival in India triggers clashes with Muslims*. Kuwait Times. Retrieved June 3, 2023, from

<https://www.kuwaittimes.com/trouble-at-hindu-festival-in-india-triggers-clashes-with-muslims/>

Mehdi, Z. (2017). PHOBIA OF RELIGION: RELIGION AS ISLAM a political argument and a psychoanalytic inquiry of Islamophobia in India. *International Journal of Applied Psychoanalytic Studies*, 14(3), 222.

Modi, N. (n.d.). *Shri Narendra Modi | Bharatiya Janata Party*. BJP.org.

Retrieved February 6, 2023, from <https://www.bjp.org/shri-narendra-modi>

National Crime Records Bureau. (n.d.). *Crime In India | National Crime Records Bureau*. □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□.

Retrieved May 28, 2022, from <https://ncrb.gov.in/en/crime-india>

NewsLaundry. (2016, December 26). *Dhulagarh Riots: Why Did Bengali Media Ignore It?* NewsLaundry. Retrieved June 2, 2023, from

<https://www.newsLaundry.com/2016/12/27/dhulagarh-riots-why-did-bengali-media-ignore-it>

Parliament of India LOK SABHA. (n.d.). *Members*. Members : Lok Sabha.

Retrieved May 30, 2022, from

<http://loksabhaph.nic.in/Members/PartyWiseStatisticalList.aspx>

Pathak, A. (2001, October 2). *Modi's meteoric rise | Ahmedabad News*. Times of India. Retrieved February 6, 2023, from <https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/modis-meteoric-rise/articleshow/1459210533.cms?referral=PM>

Rahman, F., & Sebastian, J. (2022, May 23). *The Flawed Logic of the Karnataka Hijab Ban*. The India Forum. Retrieved June 4, 2023, from <https://www.theindiaforum.in/article/flawed-logic-karnataka-hijab-ban>

Ramadhani, R. Y. (2020). Diskirminasi Kaum Muslim Di India Menurut Konvensi Hak Asasi Manusia. *Inicio Legis*, 1(1), 1-14.

Rana, J. (2007). The story of Islamophobia. *Souls*, 9(2), 148-161.

REHBAR, Q. (2022, July 31). *India's no-Muslim government raises concerns over representation*. Nikkei Asia. Retrieved June 20, 2023, from <https://asia.nikkei.com/Politics/India-s-no-Muslim-government-raises-concerns-over-representation>

Reuters. (2014, May 13). *Special Report - In Modi's India, a case of rule and divide*. Reuters. Retrieved June 1, 2023, from <https://www.reuters.com/article/uk-india-muslims-specialreport-idUKKBN0DU00D20140514>

Sajjad, M. W. (2018). Examining the State of Muslim Minority under Modi's BJP since 2014. *Strategic Studies*, 38(4), 19-36.

Sarkar, M. (2017, August 8). *Faith, fury and fear: The story behind one of history's greatest mass migrations*. CNN. Retrieved March 10, 2023, from

<https://edition.cnn.com/2017/08/08/asia/india-pakistan-independence-timeline/index.html>

Sarkar, S. (1993). The Fascism of the Sangh Parivar. *Economic and political weekly*, 28(5), 163-167.

Shams, S. (2014, February 19). *'Hated' in Pakistan – DW – 02/19/2014*. DW. Retrieved June 1, 2023, from <https://www.dw.com/en/anti-muslim-indian-leader-modi-hated-in-pakistan/a-17442154>

Shazli, T., & Asma, S. (2015). Educational vision of Muslims in India: Problems and concerns. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 4(3), 21-27.

Shih, G. (2022, March 15). *Karnataka high court upholds a ban on hijab in classes, says it is not an essential practice in Islam*. The Washington Post. Retrieved April 20, 2022, from

<https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/15/india-hijab-ban/>

Singh, K. (2009). Islamophobia in India: A case study of Gujarat 2002.

Singh, S. (2023, April 13). *65 cases of communal violence in WB between January 2021-June 2022, reveals RTI query*. The Hindu. Retrieved June 5, 2023, from <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/65-cases-of-communal-violence-in-wb-between-january-2021-june-2022-reveals-rti-query/article66729577.ece>

SOLANKI, A. (2014, May 28). *Indian Muslims wary of Modi's Hindu nationalist ties*. Arab News. Retrieved June 1, 2023, from <https://www.arabnews.com/news/578031>

Srivastava, A. (2014, August 31). *Modi in the Frame of the RSS' Vision of a Hindu India*. Mainstream Weekly. Retrieved June 20, 2023, from

<http://mainstreamweekly.net/article5151.html>

Tillin, L. (2015). Indian elections 2014: explaining the landslide.

Contemporary South Asia, 23(2), 117-112.

Ushama, T. (2020). ISLAMOPHOBIA IN INDIA: AN EXPLORATION OF ITS ROOTS, RISE AND HISTORY. *Al-Shajarah: Journal of the*

International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 25(1), 1-29.

VOA News. (2022, October 13). *India's Top Court Fails to Settle Issue of Wearing Hijabs in Classrooms*. VOA News. Retrieved June 3, 2023, from

<https://www.voanews.com/a/india-top-court-fails-to-settle-issue-of-wearing-hijabs-in-classrooms/6788148.html>

Vyas, M. (2022, November 21). *CMIE*. CMIE. Retrieved June 21, 2023, from

<https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=warticle&dt=20221121123612&msec=746>

Wirayuda, R. (2020, February 27). *Konflik Muslim-Hindu India dari Masa ke Masa*. Historia. Retrieved April 23, 2022, from

<https://historia.id/agama/articles/konflik-muslim-hindu-india-dari-masa-ke-masa-P4nbM/page/1>